



TEMU ILMIAH NASIONAL HIMPSI

**MENELISIK PERKEMBANGAN
PSIKOLOGI INDONESIA**

18-19 November 2016

DISELENGGARAKAN OLEH :
HIMPSI & UNY

Menegaskan Kedudukan Psikologi sebagai Ilmu & Implikasinya terhadap Kurikulum Program Pendidikan Akademik Psikologi pada Jenjang S1, S2, & S3 di Tanah Air^{1,2}

A. Supratiknya³

*Kompartemen 4: Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa
Himpunan Psikologi Indonesia*

Tulisan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Dalam bagian pertama saya akan mencoba menegaskan kedudukan psikologi sebagai ilmu. Bertolak dari pilihan posisi tersebut pada bagian kedua saya akan mencoba memaparkan sejenis kerangka kasar konstruksi kurikulum Program Studi Psikologi sebagai program pendidikan akademik pada jenjang S1 atau Sarjana, S2 atau Magister, dan S3 atau Doktor, yang mampu menunjukkan kekhasan masing-masing jenjang sekaligus kontinuitas (dan diskontinuitas) di antara ketiganya.

Psikologi: Ilmu atau Bukan?

Salah satu perdebatan penting tentang Psikologi yang masih hangat hingga kini berkisar pada status atau kedudukannya, *ilmu* atau *bukan ilmu*? Terhadap pertanyaan semacam itu dengan penuh keyakinan saya berpendapat bahwa Psikologi adalah seratus persen ilmu, namun bukan dalam arti lawan atau kebalikan dari ‘bukan ilmu’ seperti tercantum dalam subjudul di atas. Tinjauan sekilas terhadap kepustakaan Psikologi yang terbit di Amerika Utara dan Eropa antara dasawarsa 1980-an sampai dengan 2000-an memang menunjukkan silang pendapat di kalangan para ilmuwan Psikologi, yaitu antara mereka yang meragukan status keilmuan Psikologi dan mereka yang tetap optimistis bahwa Psikologi dengan caranya sendiri adalah tetap sah sebagai disiplin ilmu, dan sebenarnya ada juga yang bersikap netral atau lebih tepat tak terlalu peduli dengan isu tersebut seperti misalnya Jogalekar (2013). Di Indonesia sendiri persoalan ini sebenarnya belum benar-benar menjadi isu. Secara umum tanpa pernah menyatakannya atau sebaliknya mempertanyakannya secara eksplisit, sebagian besar bahkan kita semua *haqul yakin* bahwa yang kita kerjakan dan geluti sehari-hari adalah ilmu psikologi atau psikologi sebagai ilmu. Dengan mengikuti perdebatan yang berlangsung di tempat lain, saya berharap kita memiliki keyakinan yang lebih *informed* terkait apa yang kita lakukan baik sebagai ilmuwan maupun praktisi psikologi. Maka, terkait perdebatan di atas, kita akan fokus pada dua kubu pertama, yaitu yang menyangsikan dan yang meyakini psikologi sebagai ilmu.

Psikologi Bukan Ilmu

Kelompok pertama ilmuwan Psikologi yang ‘menuduh’ Psikologi sebagai bukan ilmu dapat diberi sebutan *kaum unifikasionis*. Tokoh pertama yang bisa dipandang berada dalam kubu ini adalah **Gregg R. Henriques** (2003, 2004, 2008). Menurut Henriques (2003), saat ini tidak tersedia sebuah teori padu (*a unified theory*) tentang psikologi. Ada terlalu banyak teori dan pendekatan yang berbeda-beda satu sama lain dalam Psikologi. Keadaan ini melemahkan status Psikologi sebagai disiplin ilmu, khususnya kalau kita mengikuti gagasan Thomas Kuhn (1962) tentang proses perkembangan ilmu. Maka menurut Henriques dan mengikuti pandangan Kuhn, ketiadaan sebuah teori besar atau paradigma yang menyatukan dalam disiplin ilmu Psikologi berakibat menempatkannya dalam status praparadigmatik, bahkan menyebabkan “nothing in psychology makes sense”. Artinya, keberadaan aneka teori dan pendekatan yang beraneka ragam bahkan sering saling bertentangan satu sama lain yang

menandai keberadaan disiplin ilmu Psikologi saat ini telah menjadikan Psikologi bukan ilmu, bahkan omong kosong belaka (Henriques, 2003; h. 151).

Menurut Henriques (2008), dua jenis kelemahan paling menonjol yang menjadikan Psikologi layak dipandang sebagai bukan ilmu adalah adanya inkohereni konseptual dan pertaliannya yang erat dengan empat wilayah ilmu pengetahuan utama sekaligus. Inkohereni konseptual yang dimaksud berupa: (1) ketiadaan definisi yang berlaku umum; Psikologi bisa menerima aneka ragam definisi tentang sebuah konsep sebanyak jumlah ilmuwan Psikologi yang mencoba merumuskannya; (2) ketiadaan objek material yang disepakati bersama; Strukturalisme dan Fungsionalisme dalam Psikologi mengklaim objek material kajiannya adalah kesadaran, Behaviorisme mengklaim tingkah laku yang teramati sebagai objek materialnya, sedangkan Psikoanalisa mengklaim ketidaksadaran sebagai objek materialnya; (3) berkembang-biaknya konsep-konsep yang saling tumpang tindih dan redundan, seperti *need* atau kebutuhan, *drive* atau dorongan, *motive* atau dorongan, dan sebagainya; (4) keberadaan sejumlah paradigma dengan asumsi-asumsi epistemologis yang secara fundamental berlainan satu sama lain, seperti Psikoanalisa dan Behaviorisme; serta (e) semakin diutamakannya spesialisasi dengan akibat mengabaikan generalisasi sehingga semakin mendorong fragmentasi, seperti munculnya Psikologi Positif, Psikologi Transpersonal, dan sebagainya (h. 736).

Mengutip pendapat Allport (1960, dalam Henriques, 2008), Henriques juga menuding bahwa Psikologi memiliki hubungan erat dengan masing-masing dari empat rumpun ilmu pengetahuan utama sekaligus praktis tanpa menimbulkan disonansi kognitif atau keresahan, yaitu ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologis, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu kemanusiaan: (1) dari ilmu-ilmu fisika psikologi menyerap metodologi ilmiah, khususnya metodologi pengujian hipotesis secara deduktif-eksperimental; (2) dari ilmu-ilmu biologi, psikologi menyerap gagasan tentang evolusi dan organisme; (3) dari ilmu-ilmu sosial, psikologi menyerap gagasan tentang budaya; dan (4) dari ilmu-ilmu kemanusiaan, psikologi banyak mengambil inspirasi dari filsafat dan sastra atau bahasa. Kenyataan ini makin menegaskan problem utama ketiadaan sejenis teori payung yang mencerminkan sekaligus mengukuhkan status praparadigmatik Psikologi sebagai disiplin ilmu.

Berbeda pendapat dengan sejumlah ilmuwan lain yang tidak risih dengan situasi fragmentasi yang sedang dihadapi oleh Psikologi, Henriques (2003, 2004, 2008) menegaskan bahwa yang diperlukan oleh psikologi adalah sebuah 'proposal for the theoretical unification of psychology' (Henriques, 2008, h. 738), yaitu sebuah kerangka epistemologis yang jelas dan dengan cakupan yang juga luas sehingga mampu memberi ruang untuk mendefinisikan Psikologi sebagai disiplin dan mempersatukan secara koheren berbagai paradigma yang ada di dalamnya (2003, h. 151). Menurutnya, kerangka unifikasi epistemologis yang dimaksud dan yang perlu diadopsi oleh Psikologi terletak di antara gagasan Skinner dan Freud (h. 152). Untuk menguraikan pendapatnya, Henriques (2003) memaparkan gagasan tentang *the Tree of Knowledge System (ToK System)* sebagai sejenis pemetaan tentang proses evolusi kompleksitas semesta alam dan segala kehidupan di dalamnya beserta aneka konsekuensinya termasuk jenis-jenis pengetahuan yang kita miliki.

Bertolak dari pengetahuan tentang evolusi kompleksitas kehidupan makhluk di dunia sejak peristiwa *Big Bang* yang oleh para ahli dipandang sebagai awal kemunculan makhluk ciptaan hingga kini, pengetahuan manusia dipandang dapat digolongkan ke dalam empat kategori fundamental yaitu pengetahuan tentang *materi, kehidupan, jiwa* dan *budaya*. Masing-masing pengetahuan memiliki taraf kompleksitas yang berbeda secara hirarkis serta dipelajari oleh rumpun ilmu yang berbeda-beda, yaitu ilmu-ilmu Fisika, ilmu-ilmu Biologi, ilmu-ilmu Psikologi, dan ilmu-ilmu Sosial. Selanjutnya, masing-masing rumpun ilmu memiliki kategori objek yang berbeda-beda, yaitu *materi, kehidupan, binatang, dan manusia* yang memiliki taraf eksistensi yang juga berbeda-beda (*mati, hidup, mental, kesadaran diri*)

serta memiliki kategori tingkah laku yang berbeda-beda (*fisiokimiawi, biogenetik, neuropsikologis, soiolinguistik*) sehingga juga menuntut taraf komputasi yang juga berbeda-beda untuk mempelajarinya, yaitu *kuantum, genetik, neuronal, dan simbolik* (Henriques, 2003; 2004).

Peralihan dari satu taraf kompleksitas fundamental ke taraf kompleksitas fundamental berikutnya dijelaskan oleh sebuah *theoretical joint point* atau poros teoretis, yaitu sejenis kerangka teori yang menjelaskan sebab-sebab munculnya sebuah taraf kompleksitas fundamental (baru) dari taraf kompleksitas fundamental setingkat di bawahnya, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Dua poros teoretis pertama yang menjelaskan kemunculan Energi dari Materi serta kemunculan Kehidupan dari Energi sudah dikenal secara umum, yaitu *Big Bang* untuk yang pertama dan *seleksi alam* pada sistem-sistem kimiawi yang bersifat mereplikasikan-diri untuk yang kedua. Bagaimana peralihan dari Kehidupan ke Jiwa serta dari Jiwa ke Budaya bisa dijelaskan? Menurut *ToK System*, munculnya Jiwa dari Kehidupan dijelaskan oleh poros teoretis ketiga yang disebut *Behavior Investment Theory (BIT)* atau Teori Investasi Tingkah laku. *BIT* bukan lain adalah hasil evolusi tingkah laku melalui seleksi berbasis *reward and punishment* ala Skinner pada sistem saraf kita. Sedangkan munculnya Budaya dari Jiwa dijelaskan oleh poros teoretis keempat yang disebut *Justification Hypothesis (JuH)* atau Hipotesis Pembetulan. *JuH* bukan lain adalah ego atau kesadaran-diri manusia ala Freud yang terbentuk melalui seleksi terhadap motif-motif tak sadar demi menghasilkan tingkah laku yang bisa diterima atau dibenarkan dalam arti diberi *reward* dan bukan *punishment* oleh lingkungan sosial. Budaya bukan lain adalah sejenis sistem justifikasi atau pembetulan berskala besar (Henriques, 2003, h. 166).

Selanjutnya menurut Henriques (2003), dunia ilmu saat ini terpecah ke dalam dua kubu yang sulit didamaikan, yaitu ilmu-ilmu alam dan biologis yang lazim dikenal sebagai *hard sciences* atau disiplin-disiplin ilmu keras yang lebih bersifat empiris serta ilmu-ilmu sosial sebagai *soft sciences* atau disiplin-disiplin ilmu lunak yang mengandalkan jenis-jenis epistemologi konstruktivis yang bersifat historis dan kontekstual. Mengutip pendapat Wilson (1998, dalam Henriques, 2003), bidang psikologi terletak di antara disiplin-disiplin ilmu alamiah dan disiplin-disiplin ilmu sosial. Maka menurut Henriques (2003) dan seraya meminjam konsep Wilson (1998), sebuah psikologi yang padu (*unified*) akan mampu berperan menjembatani kedua kubu tersebut sehingga diperoleh sebuah gambaran atau peta yang konsilien tentang semua disiplin ilmu yang kita miliki.

Menurut Henriques (2008), *ToK System* tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah sistem monolitik yang secara dogmatis menggusur pluralisme, keberagaman gagasan, dan kebebasan melakukan penelitian ilmiah (h. 749). Sebaliknya, *ToK System* dimaksudkan sebagai upaya memperoleh sebuah *background of explanation* yang bersifat umum dan diterima bersama yang secara teoretis koheren dan bisa menjelaskan observasi-observasi empiris kita. *ToK System* justru dimaksudkan untuk menawarkan sebuah *integrated pluralism*, di mana perbedaan-perbedaan tekanan akibat kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, dan faktor-faktor idiografik lain diberi ruang, namun masing-masing orang terhubung pada basis pemahaman yang bersifat umum dan diyakini bersama. Begitu menurut Henriques (2008, h. 750).

Lebih lanjut dengan *ToK System*-nya, Henriques menunjukkan bahwa *the science of psychology* terdiri atas dua *domains* atau wilayah, yang sekaligus dapat ditafsirkan sebagai cara Henriques mendefinisikan objek material psikologi (Anchin, 2008), yaitu (1) *psychological formalism*, yang bertanggung jawab mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan tingkah laku mental (animal) secara umum; (2) *human psychology*, yang bertanggung jawab mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan tingkah laku manusia pada taraf individual (Henriques, 2008, h. 739). Anchin (2008) menafsirkan bahwa

rumusan Henriques (2008) tersebut dapat dipandang sebagai hendak menegaskan bahwa objek material psikologi mencakup dua wilayah: (1) *psychological formalism* sebagai sains tentang tingkah laku binatang; wilayah ini ditopang oleh BIT (*behavioral investment theory* Skinnerian) yang dipandang menyajikan sebuah kerangka koheren untuk memahami kontinuitas antara dunia binatang dan dunia manusia; wilayah ini meliputi berbagai sains tentang psikologi dasar (*basic psychological sciences*) yang berakar dalam tradisi modernisme dan ilmu-ilmu alam serta yang mengandalkan pendekatan empiris dan kuantitatif; wilayah ini merupakan wilayah kajian tentang tingkah laku binatang yang bersifat *bottom up*, serta berkontribusi menyingkapkan sifat deterministik dan taat azas (*lawfulness*) dari tingkah laku manusia sebagaimana terungkap dalam psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikologi perkembangan; serta (2) *human psychology* sebagai sains tentang tingkah laku manusia; wilayah ini ditopang oleh JuH (*justification hypothesis* Freudian) yang dipandang memberikan fondasi teoretis untuk menjelaskan diskontinuitas antara dunia binatang dan dunia manusia; wilayah ini berkaitan dengan sifat keterkaitan manusia dengan dunia sosial dan budaya meliputi antara lain pengalaman subjektif, pemaknaan terhadap pengalaman subjektif tersebut, nilai-nilai, tujuan hidup, intensionalitas; wilayah ini merupakan wilayah kajian tentang tingkah laku psikologis manusia yang bersifat *top-down* dari taraf sosio-kultural ke taraf individual; mengandalkan pendekatan yang bersifat konstruktivis, interpretif, dan hermeneutis (h. 811). Sebagaimana segera tampak, kedua wilayah Psikologi menurut objek materialnya itu dipertautkan satu sama lain oleh konsep evolusi Darwinian (Wilson, 2012).

Tokoh kedua dalam kubu unifikasionis adalah **Edward O. Wilson** (1998; Jung, 2002) dengan *teori konsiliensi*-nya atau yang secara luas dikenal sebagai *C-theory*. Berbicara dalam konteks lebih luas daripada sekadar fragmentasi dalam Psikologi, Wilson dengan *C-theory*-nya bermaksud menyatukan semua pengetahuan di bawah credo ilmiah biologi dan genetika (biogenetika). Meminjam konsep yang pertama kali dikemukakan oleh William Whewell dan John Stuart Mill pada pertengahan abad ke-19, *consilience* atau konsiliensi berarti cara induktif untuk menggabungkan aneka fakta dalam rangka menyusun aneka teori di mana teori yang satu menguatkan dan menyokong kebenaran teori yang lain (Jung, 2002: 1174). Apa yang dilakukan Wilson mirip dengan *gerakan 'Unified Science'* (selanjutnya disingkat *gerakan-US*) sebagai bentuk turunan di abad ke-20 dari apa yang sudah dirintis oleh para *French encyclopaedists* di pertengahan abad ke-18. *Gerakan-US* merupakan usaha kolaboratif di bawah payung empirisme logis yang mencoba menggabungkan semiotika, linguistik, logika dan matematika, fisika, kosmologi, ilmu-ilmu sosial termasuk psikologi, seni, teori nilai, dan biologi dengan menggunakan fisika sebagai poros (Jung, 2002: 1174). Gagasan dasar *C-theory* adalah bahwa semua fenomena nyata (*tangible*) mulai dari terbentuknya bintang-bintang hingga munculnya aneka institusi sosial dilandasi oleh proses-proses material yang pada akhirnya dapat direduksikan dalam hukum-hukum fisika. Tujuan hukum-hukum fisika adalah menemukan *causal explanation* yang berintikan prediksi ilmiah. Dengan kata lain, *C-theory* sebagai fisikalisme merupakan saintisme yang menggunakan model ilmu-ilmu alam, khususnya fisika, untuk melegitimasi validitas epistemologis dari semua pengetahuan, termasuk psikologi. Terkait Psikologi, *C-theory* menyatakan bahwa seperti ilmu-ilmu sosial lainnya Psikologi harus didasarkan pada fundasi sosiobiologis. Kini ilmu-ilmu sosial terfragmentasi ke dalam dua gugus besar disiplin ilmu, sebagian pada akhirnya akan bergabung dengan biologi sedangkan sisanya akan bergabung dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Kendati ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu kemanusiaan akan tetap berada dalam kubu yang berbeda, namun jika konsiliensi berhasil dicapai, maka interkoneksi antara kedua rumpun ilmu tersebut akan lebih mulus dibandingkan yang sudah berlangsung selama ini (Henriques, 2008: 733). Meminjam pendapat ilmuwan lain, Henriques menilai bahwa jurus unifikasi yang ditawarkan oleh *C-theory* terjebak dalam apa yang disebut

'greedy reductionism' (Dennet, 1995, dalam Henriques, 2008: 733) atau reduksionisme yang serakah, sebab begitu saja mengaburkan bahkan menghapuskan batas-batas antar disiplin ilmu dengan memaksakan bahasa fisika sebagai satu-satunya kerangka penjelasan yang benar tentang realitas. Berdasarkan *C-theory*, Psikologi belum bisa disebut ilmu karena belum mengalami atau mencapai *konsiliasi* yang mampu mempersatukan aneka teori dan pendekatan yang hidup di dalamnya.

Gagasan tentang unifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Henriques maupun Wilson, lazim dikritik sebagai turunan dari paradigma positivis-abstraksionis yang mengasumsikan keberadaan objek atau realitas yang secara esensial tetap dan tunduk pada hukum-hukum yang bersifat universal, steril dari pengaruh konteks tempat dan sejarah. Secara khusus dan sejalan dengan kecenderungan positivis-abstraksionisnya, pemikiran Henriques dikritik sebagai bercorak empirikis-naturalis. Empirikismenya tampak dari penekanannya pada pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan yang paling sah sedangkan naturalismenya tampak antara lain dari penekanannya pada hukum alam sebagai faktor penjelas paling sah tentang tingkah laku dan perkembangan manusia termasuk ketika menjelaskan nilai-nilai dan pengalaman subjektif lainnya (Slife, 2005). Sebagaimana kita tahu, etos naturalisme adalah etos hedonisme, yaitu prinsip dasar yang menyatakan bahwa apa saja di alam semesta ini pada akhirnya bertujuan mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan. Prinsip itulah yang dipakai Henriques untuk membangun konsep *theoretical joint-points*, *Behavior Investment Theory*, maupun *justification hypothesis*-nya. Menurut konsep-teori itu, peralihan evolutif semesta termasuk tingkah laku manusia dari materi (fisika) ke kehidupan (biologi), dari kehidupan ke budi (psikologi), dan akhirnya dari budi ke budaya (kultur) mengikuti proses seleksi alamiah yang dilandasi hedonisme. Di luar kritik yang cukup tajam itu, Henriques harus kita akui berjasa dalam memetakan tiga tataran tingkah laku sebagai kesatuan wilayah kajian Psikologi secara utuh meliputi tataran biologis, mental, dan budaya. Sayang, kendati mengakui bahwa masing-masing tataran tingkah laku tersebut sesungguhnya menuntut penerapan epistemologi yang berbeda untuk menelitinya, namun kerangka berpikir Henriques secara keseluruhan bersandar pada epistemologi positivistik-abstraksionis khususnya sebagaimana tercermin dari cita-cita unifikasinya.

Psikologi sebagai Ilmu

Ilmuwan yang membela Psikologi sebagai ilmu dapat ditempatkan dalam tiga kubu, yaitu: (1) mereka yang masih diresapi gagasan unifikasi, (2) mereka yang menerima pluralitas, dan (3) mereka yang tegas menyatakan Psikologi sebagai bagian Ilmu-ilmu Kemanusiaan.

Salah satu tokoh yang mengakui Psikologi sebagai ilmu disertai harapan tercapainya unifikasi dalam Psikologi adalah **M.B. Smith** (1994, dalam Giorgi, 2000) dan **Mario Bunge** (1990). Menurut Smith (1994, dalam Giorgi, 2000), Psikologi sebagai Ilmu Kemanusiaan harus dimaknai sebagai gabungan antara tradisi eksplanatorik dan tradisi interpretatif. Tujuan Psikologi sebagai Ilmu Kemanusiaan adalah mencapai kebenaran secara progresif melalui analisis hubungan sebab-akibat antara kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi tertentu (tradisi eksplanatorik) terkait dunia makna dan nilai-nilai manusia (tradisi interpretatif). Alasannya, menurut Smith, aspek-aspek tertentu Psikologi secara tak terbantahkan berada dalam wilayah ilmu-ilmu alam, seperti Neuropsikologi; sedangkan aspek-aspek lainnya berada dalam wilayah Ilmu-ilmu Kemanusiaan, seperti Psikosejarah atau ingatan kolektif. Sementara, intisari psikologi menurut Smith adalah aspek-aspek yang lebih manusiawi dari Psikologi, meliputi teori kepribadian, psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan secara khusus psikologi harus memberi perhatian pada "self" atau "sang pribadi". Dengan penuh keyakinan Smith menyatakan bahwa sebagai Ilmu Kemanusiaan Psikologi secara khusus

bertugas melakukan penyelidikan empiris dan sistematis tentang ranah yang khas manusiawi ini. Artinya, Psikologi harus mampu menjalankan agenda unifikasi dalam bentuk penerapan metodologi eksplanatorik dalam meneliti objek material khas manusia yang bersifat interpretif. Sesuatu yang sangat sukar kalau bukan mustahil!

Sementara Bunge (1990) berpendapat bahwa Psikologi sebagai disiplin ilmu tidak otonom melainkan bermitra secara erat dengan Biologi dan Ilmu Sosial, dalam pengertian Psikologi memiliki gagasan-gagasan dan metode-metodenya sendiri yang tidak sepenuhnya biologis atau sosiologis kendati menerapkan semua sarana biologis dan sosiologis yang bisa dimanfaatkannya. Dengan kata lain, Psikologi merupakan disiplin ilmu tersendiri yang sangat khas namun tidak terlepas dari disiplin-disiplin ilmu yang lain, khususnya Biologi dan Ilmu Sosial. Terkait keberadaan aneka cabang dalam Psikologi, Bunge memandang baik jika aneka cabang tersebut bisa diintegrasikan bahkan akhirnya dileburkan dengan Biologi dan Ilmu Sosial (Bunge, 1990: 135). Sesuatu yang juga sangat sukar kalau bukan mustahil!

Beberapa tokoh yang bisa dipandang membela Psikologi sebagai ilmu tanpa mempersoalkan fragmentasi bahkan memandang pluralitas dalam Psikologi sebagai kekuatan meliputi antara lain **Sigmund Koch** (1981) dari kalangan Psikologi dan **Richard Rorty** (1998) dari kalangan di luar Psikologi khususnya dari filsafat atau sastra. Didorong oleh semangat libertarian yang mengutamakan kebebasan, Koch (1981) menyatakan bahwa Psikologi bukan sebuah disiplin tunggal yang koheren melainkan merupakan gugusan “kajian psikologis” (*the psychological studies*) mencakup spektrum aktivitas dan pengalaman manusia yang sangat luas namun saling berkelindan. Mengingat begitu luasnya cakupan gugus kajian psikologis, aneka bidang kajian itu tidak hanya menuntut metode yang berbeda-beda namun juga akan menjalin kedekatan dengan bidang-bidang ilmu yang berbeda-beda pula. Dalam situasi semacam ini, pencarian sebuah paradigma tunggal yang mampu memayungi seluruh wilayah kajian hanya akan menjadi sejenis *epistemopati* atau *patologi pengetahuan*. Melalui sebuah artikel yang provokatif, penolakan terhadap usaha unifikasi dalam sebuah disiplin ilmu juga disuarakan oleh Richard Rorty (1998).

Kubu terakhir adalah mereka yang mengakui Psikologi sebagai ilmu, khususnya sebagai disiplin ilmu dalam gugus Ilmu-ilmu Sosial dan/atau gugus Ilmu-ilmu Kemanusiaan. Kubu ini meliputi antara lain **Amedeo Giorgi** (2000) dan **Hwa Yol Jung** (2002). Dalam konteks mengkritik gagasan M.B. Smith (1994) yang bermaksud mengembangkan Psikologi sebagai integrasi antara sains dan tradisi interpretif yang dinilainya mustahil, Giorgi (2000) menegaskan bahwa Psikologi sebagai cabang Ilmu-ilmu Kemanusiaan harus secara total menempatkan diri dalam tradisi deskriptif-interpretif (h. 59). Giorgi berpendapat bahwa sebagaimana antara lain tercermin dari gagasan Smith, selama ini Psikologi sebagai disiplin ilmu telah salah sasaran yaitu gagal memahami dan menjelaskan psike atau jiwa manusia yang diterjemahkan dalam sejumlah konsep seperti pengalaman, kesadaran, atau tingkah laku. Salah satu sumber kesesatan itu adalah kesalahan dalam memilih metode-metode, sedangkan kesalahan pemilihan metode itu sendiri bersumber dari ketidaktepatan dalam merumuskan asumsi-asumsi dasar tentang fenomena yang diteliti. Dalam bahasa Alex B. Berezow (2012), para psikolog gagal menyadari bahwa klaim mereka terhadap kebenaran sekular berbeda dengan klaim disiplin-disiplin ilmu dominan yang dikenal luas sebagai *hard sciences* atau ilmu-ilmu keras. Maka menurut Giorgi, Psikologi perlu melakukan reformasi radikal dengan merumuskan filsafat yang lebih tepat tentang psike sehingga dapat dikembangkan metode-metode yang juga lebih sesuai untuk memahami fenomena yang menjadi objek kajiannya. Dengan menempatkan diri secara tegas dalam gugus Ilmu-ilmu Kemanusiaan, Psikologi akan lebih produktif menjelaskan psike manusia dengan mengembangkan teori fenomenologis berikut metode-metode fenomenologis yang menjadi turunannya (h. 72).

Pendapat senada dikemukakan oleh Hwa Yol Jung (2002). Dalam konteks mengkritik gagasan Wilson tentang konsiliensi dalam Psikologi yang dinilainya terperangkap dalam jebakan koevolusionisme ala Darwin antara gen dan budaya sehingga menciptakan apa yang disebutnya “naturalisasi atas budaya” (*the naturalization of culture*), Hwa Yol Jung mengusulkan hermeneutika sebagai pendekatan yang lebih sesuai bagi Psikologi sebagai cabang Ilmu Sosial Kemanusiaan. Alasannya, manusia adalah *homo symbolicus* atau binatang yang berbahasa maka memiliki sifat dasar “self-interpreting” atau senantiasa menafsirkan dirinya sendiri dan “self-defining” atau senantiasa mendefinisikan dirinya sendiri. Hermeneutika sebagai pendekatan interpretif menekankan bahwa karena setiap tindakan memiliki struktur makna yang dikonstruksikan oleh si aktornya sendiri dalam sebuah latar panggung sosial, maka tugas seorang Psikolog sebagai ilmuwan sosial kemanusiaan terutama adalah menyelidiki struktur makna yang bersifat ‘subjektif’ atau ‘intersubjektif’ dari setiap tindakan sosial manusia. Tugas ilmuwan sosial kemanusiaan adalah melakukan “interpretive understanding” atau pemahaman yang didasarkan pada interpretasi, bukan melakukan “causal explanation” atau merumuskan hubungan sebab-akibat seperti para ilmuwan alam (h. 1188). Karena manusia merupakan binatang yang senantiasa menafsirkan dan mendefinisikan dirinya, maka peristiwa-peristiwa dalam dunia sosial manusia tidak mudah diprediksikan. Manusia sebagai “self-interpreting animals” tidak menghasilkan prediksi melainkan *self-fulfilling* atau *self-defeating prophecies*, yaitu nubuat dalam arti sejenis keyakinan personal yang berdampak mengaktualisasikan dalam arti merealisasikan diri atau sebaliknya memurukkan diri. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang mengkonstitusikan atau mengkonstruksikan realitas yang berdampak membantunya mencapai kepenuhan diri (*self-fulfilling*) atau sebaliknya menjadikan dirinya terpuruk dalam penderitaan bahkan kehancuran (*self-defeating*), dan bukan makhluk yang sibuk membuat prediksi (h. 1189).

Dipandang sebagai ilmu dan khususnya ditempatkan dalam rumpun Ilmu Sosial Kemanusiaan, Psikologi secara tak terelakkan ditarik ke dalam pusaran ontologi yang disebut relasionalisme dan epistemologi konstruktivisme sosial (Slife & Richardson, 2008). Secara garis besar, relasionalisme-konstruktivisme menyatakan bahwa setiap objek termasuk “self” atau sang pribadi pertama-tama dan senantiasa merupakan jalinan relasi dalam arti memiliki keberadaan bersama dengan objek atau pribadi lain dan saling mengkonstitusikan dalam arti menciptakan sekaligus meneguhkan keberadaan masing-masing. Tugas dan tujuan Psikologi sebagai ilmu bukan menyingkapkan kebenaran yang sudah ada dalam arti melekat pada esensi objek yang diteliti, melainkan mengungkapkan bagaimana pengetahuan tentang objek dikonstruksikan oleh para aktor dengan melibatkan seluruh konteks internal maupun eksternal yang melingkunginya. Sebagaimana akan kita lihat, paradigma yang merupakan antitesis dari positivisme ini sangat sesuai khususnya untuk meneliti tingkah laku pada tataran yang semakin tinggi dalam pembagian wilayah kajian Psikologi ala Henriques, khususnya pada tataran budaya.

Kesimpulan 1

Kesimpulan pertama yang dapat kita tarik dari perdebatan tentang status Psikologi sebagai ilmu atau bukan ilmu dan secara khusus sebagaimana dapat kita simak dari pandangan mereka yang meragukan status Psikologi sebagai ilmu adalah bahwa makna dan kriteria yang dilekatkan pada “ilmu” merupakan makna dan kriteria “hard sciences” atau ilmu-ilmu keras khususnya Fisika (dan Biologi) yang tunduk pada paradigma positivis logis yang mengandalkan pendekatan pengujian hipotesis dengan metode ilmiah-eksperimental untuk mengungkap hubungan sebab-akibat dari berbagai fenomena. Sebagaimana dicatat oleh sejumlah ilmuwan Psikologi (Gergen, Josselson & Freeman, 2015), kemunculan Behaviorisme khususnya behaviorisme klasik Watsonian dan Pavlovian (Ruiz, 2015) yang dipandang lekat dengan positivisme logis sekitar awal sampai pertengahan abad ke-20 di AS

dan Uni Soviet telah menimbulkan gejala “methodological strictures” atau penyempitan metodologis ke arah pendekatan ilmiah positivistik yang selanjutnya berkembang menjadi Psikologi arus utama atau yang secara luas kita akui “Psikologi sebagai ilmu” dengan ambisi unifikasi dan universalismenya sebagaimana tercermin dalam pandangan Henriques, praktis hingga kini. Padahal justru dalam jalur “Psikologi sebagai ilmu” inilah Psikologi mendapatkan kritik yang cukup keras termasuk dari kalangan internalnya sendiri. Apa saja kritik itu?

Kritik terhadap Psikologi sebagai Ilmu

Bertolak dari situasi perkembangan Psikologi sebagai disiplin ilmu di sejumlah negara Eropa Barat dan Amerika Utara, lontaran kritik cukup tajam yang ditujukan kepada Psikologi dapat kita golongkan menjadi dua: (1) kritik yang ditujukan pada Psikologi secara umum; dan (2) kritik yang muncul dan ditujukan pada bidang kajian tertentu dalam Psikologi, dua di antaranya yang kita perbincangkan dalam tulisan ini kali ini adalah kritik terhadap bidang Psikologi Perkembangan (Anak) dan Psikologi Positif. Terkait situasi kita, sejalan dengan pengandaian yang saya sampaikan di muka bahwa sebagian besar dari kita yakin bahwa Psikologi merupakan ilmu mengikuti kriteria-ukuran positivistik sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, maka saya berharap kita menjadi lebih *informed* dengan belajar dari kritik yang akan saya paparkan berikut ini.

Kritik terhadap Psikologi secara Umum

Ada sedikitnya dua butir kritik serius terhadap Psikologi sebagai ilmu secara umum, sebagaimana terepresentasikan dalam Psikologi yang berkembang khususnya di Amerika Serikat mulai sekitar awal abad ke-20 dan yang selanjutnya diadopsi sebagai *benchmark* internasional bagi riset Psikologi yang bercorak kuantitatif-eksperimental-laboratorium, yang bahkan kemudian dengan cepat diadopsi secara global mulai awal abad ke-21, termasuk di Tanah Air (?) hingga kini (Parker, 2012; Parker, 2015: 3).

Kritik pertama. Kritik umum pertama terhadap ilmu Psikologi kurang lebih berbunyi sebagai berikut (Parker, 2005)

“Psikologi sangat piawai mengubah orang menjadi benda...(melalui tiga cara), yaitu (1) *mengindividualisasikan* fenomena yang diteliti, (2) *mengesensialisasikan* hal-hal yang diuraikannya, dan (3) *mempsikologisasikan* hal-hal yang diterangkannya” (h. 5).

Individualisasi adalah kecenderungan ilmu Psikologi khususnya Psikoterapi menempatkan sumber atau sebab dari aneka masalah yang dialami seseorang pada aneka faktor yang terdapat di dalam dirinya belaka. Secara historis kecenderungan ini dipandang memiliki akar dalam perubahan sosial dari masyarakat feodal ke masyarakat industri yang berlangsung di kalangan masyarakat Barat di era kapitalisme awal, yang ditandai dengan hilangnya ikatan-ikatan (sosial) feodal dan digantikan oleh individualisme (Ulrich Beck, 1992, dalam Madsen, 2015). Fenomena yang disebut *institutionalized individualism* atau individualisme yang terlembagakan ini mengakibatkan orang berusaha menemukan *biographic solutions* untuk menghadapi dan mengatasi aneka problem yang sesungguhnya bersifat sistemik dalam arti melibatkan konteks yang jauh lebih luas daripada sekadar faktor internal sang pribadi. Melalui psikoterapi, ilmu Psikologi menerjemahkan kecenderungan ini ke dalam praktik *individualisasi*, yaitu “the framing of people’s problems in therapist offices in a manner that views their individual biographical histories as the sole path to the cause and

onset of, and solution to, their suffering” (Madsen, 2015; h. 225). Artinya, individualisasi adalah kecenderungan ilmu Psikologi melalui psikoterapi memperlakukan masalah yang dikeluhkan seorang klien dalam ruang terapi dengan cara-cara yang menempatkan sejarah kehidupan orang yang bersangkutan sebagai satu-satunya jalan untuk menjelaskan atau menemukan penyebab dan pemicu, serta pemecahan atas penderitaannya. Dengan kata lain, dengan individualisasi ilmu Psikologi gemar dan piawai “displacing the causes for problems onto the people who suffer from them” (Madsen, 2015; h. 225). Maksudnya, melalui individualisasi ilmu Psikologi suka mengembalikan penyebab aneka masalah (psikologis) yang dikeluhkan orang justru pada orang yang menderita akibat masalah-masalah itu sendiri!

Individualisasi juga menyebabkan Psikologi gemar memandang kemalangan entah berupa depresi atau perasaan negatif lain sebagai gangguan, kegagalan, atau bahkan penyakit. Akibatnya, ilmu Psikologi membuat orang merasa teralienasi atau terasing dari dirinya sebab melarang orang merasa malang atau marah baik terhadap kemalangan yang dialaminya sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Akibat lebih lanjut, penindasan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri oleh Psikologi diubah menjadi sekadar *negative thinking* atau “pikiran negatif”, sedangkan penindasan yang dilakukan orang lain oleh ilmu Psikologi diubah menjadi sekadar nasib sial di tangan orang yang bermasalah. Melalui “psikologi positif” ilmu Psikologi menjadikan kebahagiaan sebagai keadaan normal yang harus diusahakan oleh setiap orang (Parker, 2007a: 4). Maka, celakalah orang yang tidak bahagia!

Individualisasi secara khas juga dilakukan oleh ilmu Psikologi melalui kecenderungannya mereduksi sumber tingkah laku ke taraf individual belaka dalam bentuk aneka mekanisme yang bersifat internal. Ideologi sebagai gambaran tentang dunia dan tempat kita di dalamnya yang di zaman kita kini menjadikan eksploitasi dan penindasan terasa normal dan alami, direduksikan menjadi sekadar serangkaian keyakinan tentang dunia yang dimiliki oleh masing-masing individu tanpa dipersoalkan siapa yang diuntungkan olehnya sehingga akan berusaha untuk terus mereproduksinya tak peduli pada sekian banyak pihak lain yang dibuat rugi atau menderita karenanya. Eksploitasi dan penindasan yang menandai relasi sosial di zaman kini tidak dicoba diungkap dari dimensi sosial dan sejarahnya, melainkan sekadar dijelaskan sebagai bentuk pilihan dan pengalaman individual orang per orang. Jika kebetulan orang “salah pilih” dengan akibat mengalami penderitaan, maka derita itu sekadar dipandang sebagai buah dari “kesadaran palsu” dan ilmu Psikologi siap menyediakan obat psikologis bagi para “korban” semacam ini khususnya berupa aneka kiat untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian diri (Parker, 2007a: 48).

Esensialisasi adalah kecenderungan ilmu Psikologi menciptakan kategori-kategori tentang kepribadian orang dan selanjutnya memandang kategori tersebut sebagai esensi yaitu sejenis realitas internal dalam diri orang yang bersifat mengakar, menetap, berlaku selamanya, tak terelakkan, dan yang menentukan keseluruhan tingkah lakunya (Prentice & Miller, 2007; Parker, 2007). Esensialisasi dipandang sebagai biang munculnya aneka bentuk prasangka yang membelenggu bahkan merusak relasi sosial seperti rasisme dan seksisme. Melalui esensialisme

aneka konstruksi dominan tentang dunia yang lazimnya bias menguntungkan kepentingan kelompok-kelompok berkuasa sebaliknya merugikan kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, oleh ilmu Psikologi ditanamkan, dikonsolidasikan, diberi sejenis landasan psikologis, sehingga tercipta “realitas” yang terasa normal dan alamiah. Esensialisasi merupakan sarana utama ilmu Psikologi menjalankan peran ideologisnya (Parker, 2015: 7).

Psikologisasi adalah kecenderungan ilmu Psikologi memandang pengalaman individual sebagai sesuatu yang bersifat “psikologis” dalam arti sesuatu yang berlangsung di dalam diri masing-masing orang. Psikologisasi membuat orang merasa memiliki sejenis “psikologi” kecil di dalam diri mereka. Selanjutnya, entah sebagai proses mental atau proses emosi pengalaman internal individual tersebut dipandang sebagai milik individu namun

sekaligus juga sebagai sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dipahaminya. Dengan kata lain, psikologisasi menimbulkan alienasi yaitu pemisahan antara diri kita dengan orang-orang lain maupun juga khususnya pemisahan dengan diri kita sendiri dengan cara mengalami diri kita seolah-olah didiami dan digerakkan oleh daya-daya yang misterius bagi kita sendiri. Psikologisasi juga berakibat bahwa mereka yang tidak berfungsi atau bertingkah laku sesuai kategori-kategori yang diberikan oleh sang Psikolog akan dipandang kurang matang, salah suai (*maladjusted*), atau bahkan mengalami gangguan kepribadian atau tingkah laku. Untuk itu semua, sekali lagi ilmu Psikologi siap menyediakan “obat” atau “penawar”-nya (Parker, 2007).

Psikologisasi sering berlangsung melalui *subjektivikasi*, yaitu kecenderungan ilmu Psikologi mendefinisikan identitas orang sebagai subjek. Apa yang didefinisikan, diteliti atau dikaji, dan disimpulkan oleh para ahli ilmu Psikologi tentang orang atau seseorang lazimnya berupa label tertentu yang berdampak mendefinisikan atau menentukan identitas orang yang bersangkutan. Masalahnya, para ahli ilmu Psikologi lazim tidak menyadari adanya relasi kekuasaan dan yang timpang pula dalam apa yang dilakukannya itu. Sebagai ahli sang psikolog akan dipandang memiliki kekuasaan atau otoritas tinggi oleh orang atau klien yang sedang menjadi sasaran pemeriksaan atau penyelidikan psikologisnya. Maka, ketika seorang psikolog memberikan label “lemah mental” pada kliennya kendati tindakan itu dimaksudkan sebagai cara atau sarana untuk membuat deskripsi objektif namun lazimnya si psikolog tidak terlalu menyadari dalam arti tidak terlalu menghiraukan dampak label itu sebagai sarana menciptakan pembagian kategori sosial khususnya berupa eksklusi yang bisa memiliki dampak luas dan jangka panjang baik bagi yang bersangkutan maupun bagi lingkungan sosialnya. Psikologisasi dalam bentuk subjektivikasi dinyatakan berhasil saat klien atau orang itu menerima dan meyakini bahwa label yang diberikan oleh sang psikolog benar-benar mencerminkan identitas atau jati dirinya (Teo, 2015).

Kritik kedua. Terkait erat dengan kritik pertama, kritik kedua terhadap ilmu Psikologi secara umum berbunyi lebih kurang sebagai berikut (Parker, 2007a):

“Psikologi telah mencederai janjinya untuk memahami dan membantu orang ... memperjuangkan perubahan sosial (ke arah yang semakin baik)... pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Psikologi dirancang untuk menyesuaikan orang pada masyarakat...Psikologi berperan penting bukan karena menawarkan kebenaran, melainkan karena memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berkuasa” (h. 1).

Sebagaimana dikemukakan oleh Parker (2007b), berbagai konsep dan praktik psikologi seperti juga semua konsep dan praktik lain dalam kehidupan manusia sesungguhnya dikonstruksikan secara kultural dan historis, bukan diwariskan secara naluriah mengikuti kodrat. Selain itu, konsep dan praktik psikologi tertentu lazimnya akan menempati kedudukan istimewa dibandingkan konsep dan praktik psikologi yang lain sehingga menjadi konsep dan praktik psikologi yang dominan. Individu yang tidak sejalan atau tunduk pada konsep dan praktik psikologi dominan ini akan dipandang bermasalah dan perlu dibantu untuk menyesuaikan diri. Contohnya, seksualitas khususnya heteroseksualitas sebagai konsep dan praktik psikologi dominan lazim dipandang lebih unggul dalam arti normal dibandingkan praktik hidup selibat atau menjaga kemurnian yang sering bahkan dipandang sebagai menyimpang, sehingga mereka yang mengadopsi konsep dan praktik itu perlu dibantu untuk diluruskan atau “agar kembali ke jalan yang benar”. Masalahnya dan sebagaimana sudah disinggung, konsep dan praktik dominan di bidang apa pun lazimnya mengandung bias mengabdikan kepentingan pihak atau kelompok yang (lebih) berkuasa. Akibatnya, melalui trio

individualisasi-esensialisasi-psikologisasi alih-alih memperjuangkan perubahan dalam berbagai bidang ke arah terciptanya kehidupan bersama yang semakin baik, ilmu Psikologi dipandang berisiko besar membantu mempertahankan keadaan yang ada atau *status quo*, yang lazim hanya menghasilkan kebaikan sebesar-besarnya bagi sekelompok kecil orang atau pihak, khususnya pihak yang berkuasa, sebaliknya menimbulkan penderitaan bagi kelompok lain yang merasa terpinggirkan atau bahkan tertindas. Parker (2007b) bahkan menyebut kecenderungan ini sebagai “past errors and crimes” atau kesalahan dan kejahatan yang bisa jadi tanpa disadari telah dilakukan oleh ilmu Psikologi selama ini.

Kecenderungan ilmu Psikologi untuk berpihak pada yang berkuasa dan *status quo* secara telanjang tampak pada pilihan epistemologisnya pada positivisme atau variannya, khususnya sebagaimana berlangsung di lingkungan ilmu Psikologi arus utama. Sebagaimana kita ketahui, para pemikir kritis mazhab Frankfurt mengecam keras *positivisme* karena dipandang sebagai bentuk baru ideologi kapitalis-liberal. Menurut mereka, ideologi ini berasal dari zaman Pencerahan. Kendati berjasa mendemistifikasikan agama dan mitologi, namun positivisme mereka pandang gagal menyadari karakter dan perannya dalam mendukung *status quo*, melalui minimal dua cara: (1) dengan cara menyadarkan orang di mana pun untuk menerima dunia ini “as it is” atau apa adanya dengan akibat secara tidak kritis justru melanggengkannya, termasuk ketika yang “as it is” itu mengandung ketidakadilan seperti diskriminasi berdasarkan ras atau gender; dan (2) menyebarkan paham bahwa pengetahuan bersifat merefleksikan atau merepresentasikan dunia dengan akibat secara tidak kritis orang mengidentikkan atau menyamakan rasionalitas dengan realitas; akibat lebih lanjut, orang mengalami dunia sebagai sesuatu yang rasional dan perlu – sekali lagi, kendati mungkin menyimpan ketidak-adilan - sehingga mematahkan setiap keinginan untuk mengubahnya. Di mata para pemikir kritis mazhab Frankfurt, positivisme dalam ilmu sosial kemanusiaan seperti Psikologi bukan hanya merupakan filsafat ilmu yang cacat melainkan juga merupakan teori politik sesat yang mereproduksi *status quo* dengan cara mendorong orang berkompromi dalam arti tunduk menyesuaikan diri pada hukum-hukum sosial dan ekonomi yang sesungguhnya pantas dicurigai (Agger, 1991). Dengan kata lain, sebagai ideologi positivisme mempromosikan kepasifan dan fatalisme. Sebaliknya, para pemikir kritis itu berusaha memutus identitas atau tali persamaan antara realitas dan rasionalitas serta memandang aneka fakta sosial sebagai kepingan-kepingan sejarah yang bisa diubah. Mereka mempromosikan apa yang disebut *dialectical imagination* atau imajinasi dealektis, yaitu kemampuan memandang dunia dari sisi potensinya untuk diubah di masa mendatang, kemampuan melihat fakta-fakta sosial melampaui sekadar apa yang tampak ke arah menemukan fakta-fakta sosial baru (Agger, 1991). Sebagaimana kita tahu, hal ini merupakan salah satu pilar dari ilmu-ilmu sosial kemanusiaan ke dalam barisan mana semestinya Psikologi sebagai ilmu berhimpun, sebagaimana akan kita lihat.

Untuk mempertajam kesadaran kita tentang problem serius yang dihadapi Psikologi terkait perdebatan tentang status ilmiahnya di satu sisi dan jenis epistemologi yang semestinya dia pilih di sisi lain, berikut disajikan kritik dari dalam dan dari luar Psikologi terhadap praktik yang selama ini berlangsung di lingkungan dua bidang atau wilayah kajian Psikologi, yaitu Psikologi Perkembangan yang sudah berusia lama dan Psikologi Positif yang merupakan bidang kajian Psikologi yang relatif baru.

Kritik terhadap Psikologi Perkembangan

Menurut Hogan (2005), secara umum Psikologi Perkembangan selama ini telah gagal memberikan deskripsi dan pemahaman yang memadai tentang kehidupan sehari-hari anak dan partisipasi aktif mereka dalam dunia sosial mereka sendiri sebagai anak atau pengalaman subjektif mereka. Bisa dikatakan tidak satu pun riset tentang anak dalam Psikologi

Perkembangan (arus utama) selama ini mencoba memahami pengalaman subjektif anak. Mengutip pendapat John Flavell (1992, dalam Hogan, 2005), Hogan menyatakan bahwa Psikologi Perkembangan terlalu asyik meneliti pertumbuhan kognitif anak meliputi proses pemerolehan pengetahuan dan aneka kompetensi yang terkait dengan usia beserta dampaknya terhadap sejumlah aspek tingkah laku sosial maupun nonsosial anak, dengan akibat abai untuk meneliti pengalaman subjektifnya yaitu bagaimana sang anak sendiri memahami dan merasakan dunia sekelilingnya dengan menggunakan aneka pengetahuan dan abilitasnya itu.

Menurut Hogan (2005), salah satu sumber penyebab situasi yang tidak menggembirakan ini adalah kecenderungan riset-riset Psikologi Perkembangan bergantung pada paradigma positivis dan paska-positivis dengan mengandalkan metodologi kuantitatif berupa eksperimen, survei, atau tes objektif. Beberapa akibat negatif dari kecenderungan ini antara lain adalah: (1) anak dipandang seolah-olah memiliki eksistensi khusus yang bisa dipisahkan dari konteks hidup mereka; Psikolog Perkembangan terus berusaha menemukan hukum-hukum universal tentang perkembangan sehingga temuan-temuan riset mereka secara eksplisit maupun implisit dipandang bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja; anak yang tuna konteks itu diasumsikan berfungsi terutama pada tataran individual, dengan aneka kemampuan dan tingkah laku yang bisa *diisolasi* dari dunia sosial tempat mereka hidup; (2) masa kanak-kanak sebagai fenomena dipandang sudah diketahui oleh kaum dewasa, terbukti dari pertama, pandangan bahwa perkembangan anak bersifat teratur atau *baku* dalam arti bahwa anak bertingkah laku dan berkembang mengikuti serangkaian parameter umur sebagaimana lazim dikenal, dan kedua, pandangan bahwa perkembangan anak berlangsung mengikuti *gerak maju* alamiah secara linear (h. 26).

Pandangan dan praktik di atas berbeda sekali kalau bukan bertolak belakang dengan pandangan dan praktik riset yang didasarkan pada paradigma konstruktivis sebagaimana antara lain dipelopori oleh **Lev Vygotsky** (dalam Hogan, 2005). Menurut paradigma ini anak-anak dipandang tumbuh berkembang dalam sebuah dunia sosial di mana konteks sosial maupun waktu atau sejarah memainkan peran menentukan, sekalipun anak-anak itu tetap bertindak sebagai pelaku aktif dalam membentuk kehidupan mereka sendiri. Riset-riset di laboratorium tidak akan pernah memadai untuk mengungkap dunia nyata dan pengalaman sehari-hari anak-anak. Meminjam konsep seorang ilmuwan lain (Bronfenbrenner, 1979, dalam Hogan, 2005), Hogan menegaskan bahwa riset tentang pengalaman subjektif anak harus "*ecologically valid*" atau valid secara ekologis dalam arti berlangsung dalam aneka situasi kehidupan nyata anak agar sungguh-sungguh mampu menangkap kekayaan pengalaman anak yang memiliki relevansi atau makna bagi kehidupan mereka. Untuk itu Hogan (2005) mengajukan beberapa saran konkret dalam rangka mereformasi praktik riset dalam bidang Psikologi Perkembangan sebagai berikut: (1) asumsi tentang determinisme biologis dan keberadaan tahap-tahap perubahan yang bersifat tetap secara universal perlu digantikan oleh pandangan tentang perkembangan anak sebagai serangkaian proses transaksi antara anak dan lingkungannya yang sama-sama bergerak mengikuti perjalanan waktu; (2) Psikologi Perkembangan tidak boleh mengabaikan kehidupan anak-anak dalam situasi konkretnya kini-sini dan tidak boleh mengabaikan konteks material, relasional atau sosial, dan temporal tempat kehidupan anak-anak tersebut berlangsung; (3) Psikologi Perkembangan tidak boleh terlampaui berfokus melakukan pengukuran terhadap aneka kompetensi anak dengan akibat mengabaikan usaha mengeksplorasi hakikat dan makna berbagai aktivitas, peristiwa, dan hubungan-hubungan sosial yang membentuk pengalaman hidup anak-anak; dan (4) pengakuan terhadap peran usia kronologis sebagai salah satu dari antara banyak faktor yang berpotensi membentuk pengalaman manusia tidak boleh berakibat mengabaikan pentingnya mengungkap pengalaman subjektif anak itu sendiri (h. 37).

Kritik terhadap Psikologi Positif

Gagasan tentang Psikologi Positif sebagaimana kini kita kenal luas pertama kali dilontarkan oleh *Martin E.P. Seligman* lewat sambutannya sebagai Presiden *American Psychological Association* dalam pertemuan tahunan organisasi profesi itu pada tahun 1998. Misi Psikologi khususnya bagi masyarakat Amerika Serikat paska Perang Dunia II meliputi tiga hal, yaitu: (1) menyembuhkan penyakit mental; (2) membantu semua orang menjalani kehidupan yang lebih produktif dan lebih penuh; serta (3) mengidentifikasi dan memupuk bakat tinggi yang ada di tengah masyarakat. Seligman menilai, Psikologi cenderung terlampau menyibukkan diri dengan tujuan pertama dengan akibat mengabaikan dua tujuan lainnya (Linley, Joseph, Harrington, & Wood, 2006). Ringkas cerita, Seligman memanfaatkan sambutannya di pertemuan tahunan APA itu untuk menggulirkan gagasannya tentang Psikologi Positif. Tidak berhenti di sana, lontaran gagasan itu segera ditindak-lanjuti dengan rangkaian kegiatan meliputi sejumlah pertemuan di Akumal, sebuah kota wisata pantai yang terkenal karena kura-kuranya di Meksiko, untuk merumuskan konseptualisasi Psikologi Positif, pembentukan *Positive Psychology Steering Committee* terdiri atas lima tokoh, pembentukan *Positive Psychology Network* yang kemudian menjelma menjadi *Positive Psychology Center* di University of Pennsylvania, A.S., dilanjutkan penyelenggaraan *the first Positive Psychology Summit* di Washington, D.C., dan penerbitan edisi khusus tentang Psikologi Positif di *American Psychologist* pada tahun 2000 (Linley, *et al.*, 2006).

Secara ringkas, Psikologi Positif adalah bidang kajian tentang kondisi-kondisi dan proses-proses yang berkontribusi bagi mekar atau berfungsinya secara optimal orang, kelompok, dan institusi (Gable & Haidt, 2005). Untuk itu Psikologi Positif mencanangkan tiga tujuan: (1) melukiskan dan mengukur ciri-ciri positif yang melampaui budaya-budaya dan politik-politik partikular serta mendekati universalitas untuk membangun kekuatan-kekuatan pribadi, keutamaan-keutamaan warga, dan “good life” atau kebahagiaan; (2) mempromosikan pengalaman-pengalaman dan emosi-emosi yang positif; dan (3) menciptakan komunitas-komunitas dan institusi-institusi yang lebih positif serta yang akan mewujudkan dan mempromosikan aneka kekuatan dan pengalaman (positif) ini (Christopher, Richardson, & Slife, 2008).

Sejalan dengan ketiga tujuan di atas, maka bidang atau objek kajian Psikologi Positif dibedakan ke dalam tiga tataran, yaitu tataran subjektif, tataran individu, dan tataran kelompok. Pada tataran subjektif, objek kajian Psikologi Positif meliputi aneka pengalaman subjektif yang lazim dijunjung tinggi meliputi *well being* atau perasaan sejahtera, *contentment* atau kepuasan hati, perasaan puas (atas masa lalu), harapan dan optimisme (untuk masa depan), serta suasana serba mengalir penuh kebahagiaan (di masa kini). Pada tataran individu, objek kajian Psikologi Positif meliputi aneka sifat pribadi yang positif berupa kemampuan mencintai dan menanggapi atau memenuhi sebuah *vocation* atau panggilan hidup, keberanian, ketrampilan interpersonal, kepekaan estetik, daya tahan atau ketekunan, sikap memaafkan, orisinalitas, berpikiran ke masa depan, spiritualitas, bakat tinggi, dan kearifan. Pada tataran kelompok, objek kajian Psikologi Positif meliputi aneka keutamaan warga (*civic virtues*) dan institusi-institusi yang mampu menggerakkan individu ke arah kewargaan yang lebih baik, tanggung jawab, kerahiman (*nurturance*), altruisme, keadaban (*civility*), pengendalian diri (*moderation*), toleransi, dan etika kerja (Linley, *et al.*, 2006).

Secara akademik, Psikologi Positif berambisi mengembangkan sebuah sains universal tentang tumbuh-kembang manusia (*human flourishing*) melampaui berbagai penafsiran tentang hidup bahagia (*good life*) yang bersifat lokal. Secara khusus Psikologi Positif menunjukkan enam keutamaan kunci (*six core values*) menuju hidup bahagia yang diklaim atau didaku berlaku secara universal, meliputi keberanian (*courage*), keadilan (*justice*), peri

kemanusiaan (*humanity*), keugaharian atau kesederhanaan (*temperance*), kearifan (*wisdom*), dan transendensi. Selain itu, dengan menerapkan epistemologi naturalistik dan metodologi empiris Psikologi Positif berkeyakinan mampu menemukan kebenaran objektif untuk mewujudkan tujuan mereka mengembangkan sebuah sains atau ilmu yang bersifat inklusif atau universal tentang sumber-sumber dan cara-cara membantu orang, kelompok orang, atau institusi menjalankan fungsi atau peran mereka secara optimal (Christopher & Hickinbottom, 2008).

Namun, apa itu hidup bahagia (*good life*) atau kebahagiaan? Psikologi Positif memaknai hidup bahagia dengan minimal dua cara (Christopher & Hickinbottom, 2008). *Pertama*, hidup bahagia atau kebahagiaan dimaknai sebagai kepuasan emosi atau perasaan puas (*emotional satisfaction*) dalam arti pengalaman nikmat dan sejahtera yang bersifat subjektif (*subjective sense of well-being*). Perasaan positif ini diklaim mampu memicu aneka dampak positif yang lazim dikaitkan dengan kebahagiaan, seperti penghasilan yang tinggi, kesehatan yang prima, perkawinan yang bahagia, dan sejenisnya. Maka, tujuan utama kegiatan “life coaching” dalam Psikologi Positif adalah meningkatkan perasaan sejahtera para peserta. *Kedua*, hidup bahagia atau kebahagiaan otentik dimaknai sebagai hidup yang penuh makna berupa: (1) hidup yang menyenangkan (*pleasant life*), meliputi suasana hati yang menyenangkan serta perasaan nyaman-nikmat; (2) hidup yang berkualitas (*good life*), berkat ketersediaan kesempatan yang luas untuk mengembangkan “signature strengths”, yaitu aneka bakat-kemampuan dan keutamaan, melalui keterlibatan pada berbagai aktivitas (*engagement*) maupun kehidupan mapan yang mengalir (*flow*); dan (3) hidup yang bermakna (*meaningful life*), yaitu hidup yang didedikasikan pada sesuatu yang lebih besar dibandingkan diri sendiri.

Psikologi Positif dengan pandangan-pandangan pokoknya sebagaimana secara ringkas diuraikan di atas mendapatkan serangkaian kritik mulai dari yang serius sampai dengan yang ringan. Kritik yang serius ditujukan pada ontologi tentang “self” atau sang pribadi yang dianutnya dan yang pada gilirannya berpengaruh pada epistemologi yang diterapkannya dalam meneliti objek materialnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Slife dan Richardson (2008), Psikologi Positif menerapkan *abstraksionisme* dalam memandang dan meneliti subjek atau sang pribadi. Secara garis besar, ontologi ini menyatakan bahwa semua objek termasuk “self” atau sang pribadi paling nyata dan paling tepat bisa dipahami manakala diabstraksikan dalam arti dipisahkan dari berbagai konteks tempat objek atau fenomena itu berada atau berlangsung. Abstraksionisme identik dengan objektivisme yang memandang bahwa semua objek atau fenomena yang diabstraksikan pada dasarnya bersifat sama atau tetap kendati berada dalam konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya, abstraksionisme-objektivisme menekankan bahwa agar dapat mengungkap kebenaran tentang objek, peneliti harus mampu bersikap dualis dalam arti mengambil jarak terhadap objek penelitiannya dan harus mampu bersikap objektif dalam arti tidak boleh membiarkan subjektivitas pribadinya mempengaruhi proses dan hasil penelitiannya tentang objek yang diteliti. Ontologi abstraksionis dan epistemologi objektivis semacam ini jelas merupakan turunan langsung dari paradigma positivis. Positivisme Psikologi Positif tercermin antara lain dari ambisinya menghasilkan pengetahuan tentang hidup bahagia yang bersifat universal.

Selanjutnya, abstraksionisme-objektivisme Psikologi Positif menghasilkan pandangan tentang “self” atau sang pribadi dengan ciri-ciri sebagai berikut (Slife & Richardson, 2008). *Pertama*, seperti objek lain “self” atau sang pribadi dipandang bersifat “self-contained” dalam arti memiliki aneka kualitas yang bersifat inheren atau melekat pada dirinya dan terpisah dari semua objek lainnya. *Kedua*, sang pribadi yang terpisah (*self-contained self*) dipandang sebagai aktor (*human agent*) yang mampu menciptakan atau memilih sendiri aneka makna dan nilai bagi dirinya. Terkait hal ini, Slife dan Richardson (2008) menyebut Psikologi Positif menganut paham liberalisme minimalis (*minimalist liberalism*) yang menyatakan bahwa setiap orang bisa mendefinisikan makna hidup bahagia bagi dirinya

sendiri sepanjang hal itu tidak menghalangi hak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pandangan ini selanjutnya melahirkan konsep “liberal self”, yaitu pribadi abstrak yang tidak terikat pada kewajiban-kewajiban yang bukan hasil ciptaan atau hasil pilihannya sendiri. *Ketiga*, moralitas tidak dipandang sebagai sikap atau perbuatan yang secara esensial melekat dalam keberadaan sang pribadi, melainkan sekadar sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan, hasil, atau keuntungan tertentu. Orang bersikap jujur dan adil bukan pertama-tama demi keutamaan itu sendiri melainkan agar mendapatkan rasa nyaman, rasa sejahtera, hidup yang lebih panjang, dan sebagainya. *Keempat*, sang pribadi pada dasarnya tunduk pada prinsip hedonisme sebab hidup bahagia (*good life*) dimaknai sebagai berbagai bentuk kepuasan emosi seperti perasaan sejahtera, perasaan nyaman (*feeling good*), dan perasaan sempurna atau penuh (*fulfillment*) yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan kenikmatan. *Kelima*, sang pribadi pada dasarnya tunduk pada prinsip egoisme sebab individu dipandang sebagai pusat segala keutamaan dan kebajikan, sedangkan perhatian dan kebaikan pada orang lain hanyalah hasil atau akibat yang akan muncul dengan sendirinya manakala individu berhasil merealisasikan dirinya.

Ontologi abstraksionisme di atas berbeda secara kontras dengan ontologi *relasionalisme* yang merupakan padanan dari epistemologi konstruktivisme sosial yang umumnya dipandang lebih sesuai diterapkan untuk meneliti objek atau fenomena budaya yang lazim menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Menurut ontologi ini (Slife & Richardson, 2006), setiap objek termasuk setiap pribadi pertama-tama dan senantiasa merupakan jalinan relasi dalam arti memiliki keberadaan bersama dan saling mengkonstitusikan dengan objek atau pribadi-pribadi lain. Semua kualitas, sifat, dan identitas yang dimiliki oleh sebuah objek tidak muncul sepenuhnya dari apa yang melekat atau “berada di dalam” dirinya melainkan juga ditentukan oleh caranya saling berelasi dengan objek lain. Relasionalisme mengakui sekaligus mengapresiasi aneka keterbatasan sang pribadi, merasakan kebutuhan untuk mempertimbangkan perspektif orang lain, menghargai indahnya perbedaan (*the dignity of difference*), menentang baik “tribalisme” sempit atau sebaliknya “universalisme” yang dengan gegabah mengklaim cara mendefinisikan kebenaran yang berlaku universal. Menurut relasionalisme, kebenaran selalu bersifat parsial dan tidak tunggal. Menurut paradigma relasionalis-konstruktivis ini, seorang peneliti yang meneliti objek atau fenomena budaya tidak bisa dipisahkan dari objek atau fenomena yang mereka teliti maupun dengan keseluruhan konteks tempat penelitian itu berlangsung. Aneka keprihatinan yang mendorong penelitian dalam ilmu sosial kemanusiaan dan pengetahuan baru yang dihasilkan dari penelitian semacam itu diyakini lahir dari konteks sosio-kultural dan historis tempat sang penelitinya sendiri berada dan terlibat (*embedded*). Kegelisahan para ilmuwan sosial selalu mencerminkan nilai-nilai budaya tempat mereka menjadi bagian di dalamnya. Tidak ada pengetahuan yang netral dan bebas nilai sebagaimana juga tidak ada pengetahuan yang bersifat universal dan ahistoris (Christopher & Hickenbottom, 2008).

Bertolak dari argumen relasionalis-konstruktivis di atas, Psikologi Positif mendapatkan sejumlah kritik sebagai berikut. *Pertama*, Psikologi Positif diduga didasari oleh ideologi dominan masyarakat di negara-negara industri kaya khususnya budaya kelas menengah Amerika, yaitu ideologi *individualisme* atau lebih tepat lagi *individualisme liberal*. Ideologi ini antara lain menyatakan bahwa: (1) terdapat “self” atau sang pribadi yang secara esensial bersifat tetap dan terpisah dari pribadi lain maupun dunia tempat mereka hidup dan berada; dan (2) berbagai makna dan nilai bersifat subjektif, maka setiap orang bebas menentukan makna maupun cara mengejar kebahagiaan (*good life*) sepanjang tidak menghalangi orang lain melakukan hal yang sama (Christopher, Richardson, & Slife, 2008). *Kedua*, dengan mengutamakan berpikir positif (*positive thinking*) serta menempatkan peningkatan-diri (*self-enhancement*) dan pemenuhan-diri (*self-fulfillment*) lewat usaha pribadi sebagai tujuan hidup, Psikologi Positif diduga telah membajak konsep individualisme yang

aslinya dimaknai sebagai persamaan hak, kebebasan, dan martabat (*dignity*) menjadi sekadar kemandirian (*self-reliance*) dan kultur pribadi (*self-culture*) yang mengutamakan kebutuhan individu untuk mengembangkan berbagai kualitas dan kemampuan pribadinya yang unik terlepas dari masyarakat di sekelilingnya. Melalui pengungkapan diri yang unik dan otentik diyakini individu akan memperoleh kepuasan dan kenikmatan pribadi. Berbagai kualitas positif termasuk aneka keutamaan dan kebajikan dijunjung tinggi bukan karena kebaikan intrinsik maupun manfaatnya bagi kebaikan bersama dalam masyarakat melainkan karena perasaan nyaman-bahagia yang timbul bila orang sudah berhasil melakukannya (Becker & Marecek, 2008a). *Ketiga*, kekekatannya pada individualisme liberal kelas menengah Amerika diduga telah menyebabkan Psikologi Positif cenderung memaknai “yang sosial” secara sempit khususnya terbatas pada hal-hal yang bersifat lokal dan terkait keluarga serta mengabaikan dimensi politis, kultural, maupun ekonomisnya. Sebaliknya, Psikologi Positif memandang nilai-nilai sebagai pilihan pribadi sedangkan individu pun bebas memilih baik makna maupun cara mengejar kebahagiaan sepanjang tidak menghalangi orang lain melakukan hal yang sama, namun lupa pada kenyataan bahwa kebahagiaan tidak tersedia sama mudah dan sama rata untuk semua orang (Becker & Marecek, 2008a). *Keempat*, berdasarkan semua pertimbangan di atas maka seperti semua cabang Psikologi lain bahkan semua disiplin ilmu, Psikologi Positif sesungguhnya hanyalah artefak budaya, produk dari masa dan tempat kelahirannya, yaitu masyarakat industrial Barat pada umumnya maupun kelas menengah Amerika di awal abad ke-21 pada khususnya. Sebagai artefak budaya masyarakat kapitalis industrial, Psikologi Positif bahkan dipersamakan dengan *Oprah Whitney Talk Shows* yang sangat populer di Amerika Serikat (Vazquez, 2013) atau secara berseloroh dijuluki “the new science of happiness” sebab dipandang menyajikan jawaban yang dangkal, simplistik, dan naif terhadap pertanyaan abadi tentang makna dan tujuan hidup, dan dipandang tak lebih sebagai “self-help” yang dikemas ulang dan diberi status baru yang lebih bergengsi sebagai sains atau ilmu (Miller, 2008). *Kelima* atau terakhir, abainya Psikologi Positif pada konteks sosial-historis-kultural diduga sebagian disebabkan oleh kiblatnya pada epistemologi dan metodologi positivistik-abstraksionis dari psikologi arus utama di Amerika (Becker & Marecek, 2008b). Seandainya kemudian Psikologi Positif benar-benar gagal menyadari konteks budaya yang melahirkannya dan terus mempromosikan dan merekomendasikan pandangan dan gaya hidup yang sesungguhnya merupakan individualisme kelas menengah Amerika yang mengutamakan otonomi pribadi dan pemenuhan diri yang sepenuhnya dirumuskan dan dimaknai secara individual itu pada masyarakat lain dengan orientasi nilai yang berbeda, dikhawatirkan Psikologi Positif menjadi semacam “disguised ideology” atau ideologi terselubung yang disusupkan sebagai “imposed etic” yang cenderung memarjinalkan realitas kehidupan kelompok miskin (Christopher & Hickinbottom, 2008; Christopher, Richardson, & Slife, 2008; Becker & Marecek, 2008a). Jika tujuan Psikologi Positif adalah memberikan landasan metateoretis tentang cara menjalani kehidupan yang optimal sesungguhnya cukup mengedepankan sebuah psikologi namun yang diselaraskan dengan konteks sosial dan historisnya (Fernandez-Rios, L., & Cornes, J.M., 2009).

Kesimpulan 2

Memaknai Psikologi sebagai ilmu dengan menempatkannya hanya dalam satu gugus ilmu pengetahuan, entah dalam gugus ilmu-ilmu alam atau dalam gugus ilmu-ilmu sosial kemanusiaan rasanya tidak akan pernah memadai. Menempatkan diri sepenuhnya dalam gugus ilmu alam disadari atau tidak Psikologi dipandang telah melakukan banyak dosa bahkan kejahatan yang justru bertolak belakang dengan misi dasarnya membantu meningkatkan kesejahteraan umat manusia, khususnya akibat terperosok ke dalam titik buta

dekontekstualisasi dan ahistorisitas. Sebaliknya menempatkan diri sepenuhnya dalam gugus ilmu sosial-kemanusiaan diduga juga akan mengabaikan salah satu sisi realitas manusia, khususnya sebagai makhluk biologis yang berbadan. Bahkan para tokoh yang mengusulkan unifikasi dalam rangka menegaskan status keilmuan Psikologi pun tak urung dihadapkan pada kenyataan bahwa Psikologi pada dasarnya berdiri di atas minimal dua kaki, satu kaki berpijak pada dunia ilmu-ilmu alam khususnya biologi sedangkan kaki yang lain berpijak di atas dunia ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Demi mendapatkan ruang gerak yang lebih luas dan memperoleh pemahaman yang utuh tentang manusia sebagai makhluk yang berdimensi biologis-mental-kultural, pengakuan Psikologi sebagai himpunan kajian psikologis tanpa kehilangan status ilmunya kiranya menjadi pilihan yang paling realistis khususnya jika dikaitkan dengan kebutuhan merancang program pendidikan akademik Psikologi mulai jenjang S1, S2 sampai dengan S3.

Merancang Program Pendidikan Akademik Psikologi pada Jenjang S1, S2 & S3

Berdasarkan uraian di atas, terhadap silang pendapat tentang status ilmu atau bukan ilmu Psikologi dengan tegas saya berpendapat bahwa Psikologi adalah ilmu kendati ditandai oleh keberadaan aneka teori atau perspektif yang mungkin saling bertentangan di dalamnya, sehingga sebagai ilmu Psikologi lebih merupakan himpunan kajian tentang tingkah laku manusia dengan spektrum yang mungkin tanpa batas. Pilihan posisi ini saya dasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, posisi ini saya pandang sejalan dengan arus besar dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan yang menekankan prinsip *polivokalitas* yaitu bahwa kebenaran tidak pernah bersifat tunggal apalagi universal melainkan plural dan kontekstual (Saukko, 2003). Akibatnya, keragaman perspektif justru harus dirayakan, bukan disesalkan. *Kedua*, posisi ini juga sejalan dengan pengakuan atas keragaman objek material Psikologi sebagai ilmu sebagaimana tersirat dalam *ToK-System*-nya Henriques (2003, 2004, 2008) meliputi tiga dimensi tingkah laku manusia, yaitu fisik, psikis atau mental, dan simbolik atau kultural. Pemilahan tiga dimensi objek material Psikologi sebagai ilmu ala Henriques ini ternyata juga sejalan dengan pemilahan ke dalam tiga taraf analisis dalam mempelajari jiwa dan tingkah laku manusia sebagaimana lazim dipromosikan oleh Psikologi arus utama, yaitu taraf rendah atau bawah yang berfokus pada proses biologis, taraf sedang atau menengah yang berfokus pada proses interpersonal, dan taraf tinggi yang berfokus pada proses kultural dan sosial (Stangor, 2011). *Ketiga* dan yang terpenting, posisi ini sekaligus juga sejalan dengan keberadaan tiga perspektif akademik utama yang membentuk pluralitas dalam Psikologi yaitu *natural-scientific psychology* atau psikologi ilmiah-alamiah, *human-scientific psychology* atau psikologi ilmiah-kemanusiaan, dan *critical psychology* atau psikologi kritis (Teo, 2005).

Secara khusus, tiga kategori objek material dan tiga perspektif akademik yang memberi warna khas Psikologi sebagai disiplin ilmu tersebut kiranya dapat dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan program pendidikan akademik Psikologi pada jenjang S1, S2, dan S3 yang mampu menunjukkan keunikan masing-masing jenjang di satu sisi sekaligus kontinuitas antar jenjangnya sebagai sebuah program pendidikan akademik yang komprehensif di sisi lain. Untuk sampai pada pembahasan tentang kerangka kasar kurikulum masing-masing jenjang program pendidikan akademik Psikologi saya akan menggunakan paparan tentang masing-masing dari tiga perspektif akademik utama dalam Psikologi sebagai pintu masuk. Sebagaimana akan kita lihat, masing-masing perspektif memiliki asumsi yang berlainan terkait objek material, metodologi, dan dimensi etis-politis atau relevansi psikologi bagi kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Dengan menempatkan ketiganya sebagai sebuah rangkaian program besar yang komprehensif, ke depan Psikologi sebagai disiplin ilmu

yang komprehensif diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal baik berupa pemahaman yang utuh tentang tingkah laku manusia maupun berupa prakarsa yang efektif dalam rangka mengusahakan formasi dan transformasi sosial ke arah terbentuknya pribadi-pribadi yang merdeka serta kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tiga perspektif akademik dalam Psikologi (Teo, 2005) beserta implikasinya terhadap penyusunan kerangka kasar kurikulum program pendidikan akademik Psikologi pada masing-masing jenjang yang sesuai, kurang lebih adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

***Natural-scientific Psychology* atau Psikologi Ilmiah-Alamiah**

Psikologi yang mengasimilasikan prinsip-prinsip ilmu-ilmu alam ini cenderung mengutamakan sebagai objek materialnya tingkah laku manusia pada taraf manusia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk berjiwa dalam taksonomi Henriques (2003, 2004, 2008), atau yang mengutamakan analisis tingkah laku manusia pada taraf rendah-biologis mengikuti pembagian taraf analisis ala Stangor (2011). Seperti dalam ilmu-ilmu alam, metodologinya cenderung *analitis-eksplanatoris*, menguraikan objek penyelidikannya ke dalam variabel-variabel yang terumuskan secara rinci dan spesifik. Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan *nomotetik* berupa rumusan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip umum agar mampu memprediksikan serta mengendalikan secara teknis aneka proses atau objek penelitiannya, yaitu tingkah laku manusia. Perspektif ini menginduk pada aneka filsafat ilmu tradisional khususnya empirisme dan positivisme. Premis atau dasar pemikirannya adalah bahwa kebenaran tentang objek dapat dicapai melalui penyelidikan yang semakin baik dan semakin canggih. Kecanggihan tersebut terealisasikan manakala sejak abad ke-20 mulai dikembangkan metode-metode eksperimental dan metode-metode kuantitatif. Sebagaimana kita tahu, perspektif ini kini menjadi perspektif dominan sebagai Psikologi arus utama yang juga mewarnai Psikologi di Tanah Air (?).

Menurut hemat saya, perspektif psikologi ilmiah-alamiah ini sesuai untuk dijadikan dasar pengembangan kurikulum program pendidikan akademik Psikologi pada jenjang S1. Dalam kurikulum akademik jenjang S1 mahasiswa diperkenalkan secara tuntas dengan konsep-konsep dan teori-teori serta metodologi yang dikembangkan berdasarkan paradigma positivis dan paskapositivis. Konsep-konsep dan teori-teori tradisional Psikologi khususnya sebagaimana diwakili antara lain oleh teori-teori kognitif-behavioral (antara lain Ivan Pavlov, B.F. Skinner) dapat diperkenalkan secara tuntas pada jenjang S1. Metode-metode kuantitatif mulai dari survei, eksperimental, pengukuran psikologis, sampai analisis statistik multivariat dan pemodelan kiranya juga bisa bahkan perlu diperkenalkan secara tuntas pada jenjang ini. Secara khusus, penguasaan teknik analisis statistik sampai ke analisis multivariat seperti analisis faktor di jenjang S1 ini saya anggap perlu karena kurikulum akademik jenjang S1 sudah menuntut mahasiswa menguasai konsep maupun ketrampilan mengkonstruksi alat ukur atribut psikologis baik berupa abilitas maupun disposisi atau kecenderungan kepribadian, sedangkan baik untuk keperluan validasi konstruk maupun penentuan cara penskoran dan analisis data yang dihasilkan alat ukur psikologis semacam itu kini lazim juga harus diperiksa dimensionalitasnya dengan analisis faktor (Furr, 2011). Dengan cara ini diharapkan produksi pengetahuan yang dihasilkan oleh lulusan program akademik S1 Psikologi melalui skripsi akan lebih kaya dan lebih berbobot.

***Human-scientific Psychology* atau Psikologi Ilmiah-Kemanusiaan**

Psikologi yang mengutamakan prinsip-prinsip ilmu sosial kemanusiaan ini memilih sebagai objek materialnya tingkah laku manusia pada taraf manusia sebagai makhluk berjiwa dan makhluk berkesadaran-diri dalam taksonomi Henriques (2003, 2004, 2008).

Sebagaimana akan tampak nanti, psikologi ilmiah-kemanusiaan ini mengutamakan analisis tingkah laku manusia pada taraf menengah-interpersonal mengikuti pembagian taraf analisis ala Stangor (2011). Metodologinya bersifat sintetik, menggabungkan unsur-unsur psikologis menjadi sebuah kesatuan yang lebih besar, bahkan proyek penelitiannya sejak awal difokuskan pada upaya memahami sosok utuh kejiwaan manusia. Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan tentang cara subjek entah itu orang, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah kebudayaan memaknai aneka fenomena atau pengalaman hidupnya. Perspektif ini menginduk pada aneka filsafat ilmu yang bercorak interpretatif-hermeneutis dan mengandalkan aneka metode penelitian yang bercorak kualitatif. Premis atau dasar pemikirannya adalah bahwa dengan dibantu menemukan atau merumuskan makna dari aneka pengalaman hidupnya maka orang, komunitas atau kebudayaan diharapkan mampu tumbuh menjadi orang, komunitas, atau kebudayaan yang semakin baik (Teo, 2005). Kendati sudah mengusung konsep kualitatif-hermeneutis dalam pendekatan penelitiannya, namun dalam praktik banyak penelitian dengan perspektif ini masih berinduk pada epistemologi positivis/paska-positivis, khususnya berupa jenis penelitian kualitatif yang dikategorikan deskriptif. Di situ peneliti sekadar menginterpretasikan data pada taraf empatik-deskriptif yaitu berusaha memahami makna yang diungkapkan oleh subjek menurut sudut pandang subjek, di mana makna tersebut diyakini terdapat di dalam diri subjek (Willig & Stainton-Rogers, 2008). Memang dengan demikian tugas psikologi seolah-olah berhenti untuk sekadar memahami fenomena.

Menurut hemat saya, perspektif psikologi ilmiah-kemanusiaan ini sesuai dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum program pendidikan akademik Psikologi pada jenjang S2. Di sini mahasiswa diperkenalkan secara cukup tuntas dengan konsep-teori dan metodologi yang dikembangkan berdasarkan paradigma yang saya sebut semi-konstruktivis dalam arti sudah mempertimbangkan pengalaman subjektif manusia di satu sisi namun belum sepenuhnya lepas dari paradigma positivis/paska-positivis di sisi lain. Konsep-konsep dan teori-teori dari tradisi Psikologi Humanistik (seperti antara lain Abraham Maslow, Carl Rogers) dan Psikoanalisa klasik (seperti Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erik Erikson) kiranya dapat diperkenalkan secara cukup tuntas pada jenjang S2. Metode-metode kualitatif berbasis analisis isi kualitatif yang lebih bertujuan memahami pengalaman subjektif seperti fenomenologi, riset naratif, oetnografi dan *mixed-methods* sebagai gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif yang masih bercorak pengujian hipotesis dapat dieksplorasi secara tuntas pada jenjang ini. Mengikuti pendapat Gergen, Josselson, dan Freeman (2015), riset psikologis pada jenjang ini sebaiknya ditujukan untuk tidak hanya mengungkap pengalaman hidup manusia melainkan juga membuat kita sendiri para ilmuwan Psikologi menjadi lebih peka dengan dunia manusia sehingga juga mampu merumuskan cara-cara untuk menjalin pertemuan dengan orang lain dengan penuh penghargaan, dengan tujuan akhir membangun relasi yang lebih mendalam dengan semua orang di dunia ini (h. 4).

***Critical-psychology* atau Psikologi Kritis**

Psikologi yang terinspirasi dari pemikiran kaum feminis, pasca-strukturalis/pasca-modernis, psikoanalisa, dan kritik-ideologi ini secara khusus memilih sebagai objek materialnya tingkah laku manusia pada taraf manusia sebagai makhluk berkesadaran-diri dan berkebudayaan dalam taksonomi Henriques (2003, 2004, 2008), atau yang mengutamakan analisis tingkah laku manusia pada taraf tinggi-kultural mengikuti pembagian taraf analisis dalam Psikologi ala Stangor (2011). Menginduk pada dasar-dasar pemikiran teori kritis, konstruksi sosial dan liberasi atau pemerdekaan, perspektif ini bertujuan menghasilkan pengetahuan kritis tentang psikologi yang bermanfaat untuk membantu orang atau komunitas, khususnya orang atau komunitas yang mengalami aneka bentuk ketidakadilan, mencapai

emansipasi atau liberasi-pemerdekaan sehingga mampu melakukan *social action* atau tindakan sosial dan dengan begitu mendorong dan memfasilitasi terjadinya perubahan sosial ke arah kehidupan bersama yang semakin baik. Bertolak dari keyakinan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi sosial sehingga bersifat kontekstual baik terkait konteks sosial maupun konteks historisnya serta bersifat politis dalam arti tak pernah lepas dari hasil kontestasi atau pertarungan kekuasaan, Psikologi Kritis mengandalkan refleksi-diri dan pendekatan lintas disiplin sebagai metodologinya (Parker, 2005; Teo, 2005).

Secara lebih spesifik, Psikologi Kritis ditandai oleh beberapa ciri sebagai berikut (Parker, 2007): (1) mengajak para ilmuwan Psikologi mengkritisi disiplin ilmunya sendiri, yaitu memeriksa secara kritis betapa jenis-jenis tindakan dan pengalaman psikologis tertentu dipandang lebih unggul dibandingkan yang lain (misal, heteroseksualitas lebih sehat atau lebih normal dibandingkan homoseksualitas; kebahagiaan lebih sehat atau lebih normal dibandingkan kesedihan, dan sebagainya), dan betapa konsep-teori “psikologi” yang dominan semacam itu telah berfungsi secara ideologis dan lazimnya bias pada kepentingan pihak tertentu yang berkuasa (misal, sikap menerima sebagai bentuk *adjustment* cenderung selalu dipandang lebih sehat atau normal dibandingkan sikap kritis atau menolak sebagai bentuk *maladjustment*, yang bemuara pada dikukuhkannya *status quo*); (2) mengajak ilmuwan Psikologi untuk memeriksa betapa aneka konsep-teori psikologi sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dalam konteks budaya dan sejarah tertentu, dan betapa konsep-teori alternatif dapat menyokong atau sebaliknya menggoyahkan asumsi-asumsi ideologis dalam aneka konsep-teori yang sudah mapan; (3) mengajak ilmuwan Psikologi untuk mencermati bentuk-bentuk *surveillance* atau pengawasan dan regulasi-diri yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti betapa budaya psikologis atau psikologisasi terbukti telah berlangsung juga di luar tembok praktik akademik dan profesi psikologi; sebaliknya pula (4) mengajak ilmuwan Psikologi mencermati betapa “psikologi awam dalam kehidupan sehari-hari” sesungguhnya juga mempengaruhi aktivitas akademik dan profesi Psikologi serta betapa aktivitas kehidupan sehari-hari bisa memberikan dasar untuk mengkritisi praktik akademik maupun profesi Psikologi yang berlangsung kini. Beberapa contoh aliran Psikologi yang mengusung paradigma psikologi kritis meliputi antara lain Psikologi Feminis (Bohan, 1993), Psikologi Poskolonial (Hook, 2005), dan Psikologi Pembebasan (Montero, 2007).

Mengingat corak historis dan politisnya kajian dalam perspektif Psikologi Kritis menuntut pendekatan yang bersifat lintas disiplin. Ternyata, tuntutan atas pendekatan lintas disiplin ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik pada jenjang Pasca-sarjana pada umumnya maupun pada jenjang Doktor pada khususnya sebagaimana antara lain diamanatkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menuntut agar lulusannya “mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner” (Jenjang Kualifikasi 8 atau S2), atau “melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner” (Jenjang Kualifikasi 9 atau S3; Perpres Nomor 8/2012). Memang ada beberapa cara memaknai istilah “lintas disiplin”, namun dalam Psikologi Kritis tentu bukan diartikan sebagai sekadar strategi riset melibatkan sejumlah disiplin yang dalam Permendikbud No. 154/2014 disebut “multidisiplin”, melainkan lebih mendekati istilah “interdisiplin” yang dalam Permendikbud yang sama diartikan sebagai strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya sehingga memunculkan metode baru bahkan mungkin disiplin akademik baru. Secara khusus Psikologi Kritis membutuhkan pendekatan lintas disiplin dalam arti strategi riset yang menempatkan manusia sebagai makhluk berkebudayaan, yaitu makhluk yang *berhasrat* (biologis), *berbahasa* (simbolik), dan *melakukan pertukaran* dalam sebuah jaringan relasi sosial sekaligus (ekonomis, politis). Dalam bahasa penelitian kritis-konstruktif-liberatif, Psikologi Kritis membutuhkan jenis penelitian kualitatif yang mampu menafsirkan data

berupa aneka jenis teks (*lived experiences* atau *pengalaman hidup*, diskursus atau *wacana*, dan *konteks global*) pada taraf *kritis-hermeneutis*, dengan cara menyusun narasi alternatif tentang fenomena tertentu demi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan baru tentang fenomena yang bersangkutan dan yang mendorong tindakan sosial ke arah terbentuknya kehidupan sosial yang lebih baik.

Interpretasi sendiri dalam Psikologi Kritis dimaknai sebagai usaha mengamplifikasikan atau memperluas atau memperkaya makna dengan cara mengeksplorasi dalam arti mengungkap aneka unsur atau helai makna yang membentuk sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Dengan kata lain, interpretasi merupakan sebuah *interrogation interminable* atau interogasi tanpa batas, tidak mengenal akhir. Semua pemahaman bersifat parsial, senantiasa ada sesuatu yang tetap tak terpahami pada setiap fenomena. Maka, seorang peneliti kualitatif-interpretatif dalam Psikologi Kritis dituntut untuk mampu melihat melampaui apa yang menampakkan diri, mengungkap dimensi-dimensi fenomena yang tersembunyi, namun pada saat yang sama harus berusaha untuk tidak memaksakan makna tertentu pada fenomena tersebut, tidak memerasnya ke dalam kategori-kategori atau rumusan-rumusan teoretis tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, serta tidak mereduksinya pada sebuah faktor penyebab tertentu (Willig & Stainton-Rogers, 2008). Pengetahuan baru tersebut pada akhirnya harus mendorong tindakan berupa emansipasi dan transformasi ke arah terciptanya pribadi-pribadi yang merdeka serta kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, bebas dari aneka bentuk eksploitasi dan diskriminasi.

Menurut hemat saya, perspektif Psikologi Kritis ini sesuai dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum program pendidikan akademik Psikologi pada jenjang S3. Di sini mahasiswa diperkenalkan secara cukup tuntas dengan konsep-teori dan metodologi yang dikembangkan berdasarkan paradigma kritis-konstruktivis dan bercorak lintas-disiplin. Konsep-konsep dan teori-teori dari tradisi ilmu-ilmu sosial kemanusiaan kritis, khususnya *teori kritis*, *semiotika* meliputi baik strukturalisme dan khususnya paska-strukturalisme, dan *psikoanalisa* khususnya sesudah diinterpretasikan kembali oleh tokoh-tokoh seperti Jacques Lacan dan Slavoj Zizek, perlu diperkenalkan secara cukup tuntas pada jenjang S3. Metode-metode penelitian yang bercorak hermeneutis-kritis, historis-kritis, dan dekonstruktif perlu diperkenalkan secara memadai pada jenjang S3 meliputi antara lain *etnografi baru* sebagai pendekatan yang efektif untuk meneliti pengalaman hidup, *analisis genealogis* dan *dekonstruksi* sebagai pendekatan yang efektif untuk meneliti wacana, dan *penelitian tindakan* sebagai pendekatan yang efektif untuk meneliti sekaligus mengubah konteks baik simbolik maupun material.

Beberapa Catatan Akhir

Ada beberapa catatan yang perlu saya berikan khususnya terkait usulan tentang rancangan kurikulum program pendidikan akademik pada jenjang S1, S2 dan S3 yang diturunkan dari sebuah ilmu Psikologi komprehensif yang mempertimbangkan seluruh dimensi realitas manusia biologis-mental-kultural dalam menentukan objek materialnya. *Pertama*, pemilahan tiga perspektif ke dalam tiga jenjang program pendidikan akademik Psikologi di atas tidak harus dipandang sebagai pemisahan yang bersifat mutlak, namun terbuka bagi terjadinya irisan-irisan antar perspektif dan antar jenjang. Penempatan perspektif tertentu pada jenjang tertentu harus lebih dipandang sebagai sejenis konsentrasi atau penekanan tanpa harus menafikan yang lain. Namun prinsip bahwa sampai jenjang yang tertinggi lulusan program pendidikan akademik Psikologi harus minimal mengenal konsep-teori dan metodologi yang bercorak lintas-disiplin sebagaimana dimaksudkan dalam tulisan ini kiranya tidak bisa ditawar.

Kedua, pada akhirnya pembeda utama antar perspektif dan karenanya juga antar jenjang pendidikan akademik Psikologi adalah epistemologi beserta metodologi utama yang diterapkan pada masing-masing jenjang. Maka, bidang atau wilayah yang diteliti bisa sama, namun perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi pada akhirnya harus terletak pada epistemologi dan metodologi yang diterapkan sehingga juga menghasilkan pengetahuan baru yang berbeda dalam arti semakin luas dan semakin mendalam, bisa jadi tentang fenomena yang sama.

Ketiga, sebagai sebuah program akademik dalam bidang Psikologi dengan objek material dan perspektif sebagaimana sudah disajikan dan yang pertama kali memperkenalkan pendekatan lintas disiplin, program akademik S2 Psikologi menuntut penguasaan basis disiplin Psikologi yang kokoh dari para mahasiswanya. Maka, syarat *mono-entry* dalam penerimaan calon mahasiswa program akademik S2 Psikologi mutlak perlu diterapkan.

Keempat, sebaliknya untuk program akademik S3 Psikologi sebagai program lintas disiplin dengan objek material dan perspektif sebagaimana sudah disajikan, program ini justru menjadi terbuka lebar bagi lulusan dari semua latar belakang pendidikan pada jenjang di bawahnya. Tuntutan matrikulasi menjadi kurang relevan, sebab praktis semua mahasiswa akan diwajibkan menempuh sejumlah mata kuliah konsep-teori maupun mata kuliah metodologi yang sama sekali baru khususnya justru bagi mereka yang berlatar belakang S1 atau S2 Psikologi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air yang menurut hemat saya cenderung masih setia mengikuti perspektif ilmiah-alamiah dalam mempelajari dan mengembangkan psikologi bahkan sampai jenjang S3. Secara khusus, mahasiswa akan diperkenalkan baik pada teori-teori utama dalam ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan lintas-disiplin baik yang bercorak kritis, psikoanalitis, maupun semiotis, serta dengan aneka metodologi lintas disiplin yang lebih bercorak refleksif-kritis-(de)konstruktivis-politis seperti etnografi baru, dekonstruksi, analisis wacana, sehingga membuka jalan yang lebih lebar bagi lahirnya kontribusi etis yang lebih signifikan dari Psikologi bagi terjadinya formasi dan transformasi sosial ke arah terbentuknya pribadi-pribadi yang merdeka serta masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

Kelima, salah satu kendala serius yang bakal dihadapi kiranya adalah kelangkaan bahkan mungkin ketidak-tersediaan dosen dari kalangan Psikologi sendiri untuk mengampu baik mata kuliah teori maupun mata kuliah metodologi bercorak lintas-disiplin yang diperlukan. Menurut hemat saya, kerja sama dalam bentuk peminjaman dosen dari institusi lain seperti Fakultas Filsafat atau Fakultas Ilmu Budaya bisa menjadi solusi jangka pendek. Belajar lagi baik melalui kelompok-kelompok studi maupun secara otodidak dalam rangka *long life learning* bagi semua dosen di lembaga penyelenggara pendidikan Psikologi rasanya menjadi solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditawarkan. Itulah satu-satunya cara menatap dan menapaki jalan menuju masa depan pendidikan akademik Psikologi sekaligus masa depan Psikologi yang lebih terlibat dan lebih kontributif bagi kehidupan bersama kita sebagai bangsa. **Sekian.**

Daftar Acuan

- Agger, B. (1991). Critical theory, poststructuralism, postmodernism: Their sociological relevance. *Annual Review of Sociology*, 17, 105-131.
- Anchin, J.C. (2008). The critical role of the dialectic in viable metatheory. A commentary on Henriques' Tree of Knowledge System for integrating human knowledge. *Theory & Psychology*, 18(6), 801-816.

- Becker, D., & Marecek, J. (2008a). Dreaming the American dream: Individualism and positive psychology. *Social and Personal Psychology Compass*, 2(5), 1767-1780.
- Becker, D., & Marecek, J. (2008b). Positive psychology. History in the making? *Theory & Psychology*, 18(5), 000-000.
- Berezow, A.B. (2012, Juli 13). Why psychology isn't science. *Los Angeles Times*.
- Bohan, J.S. (1993). Regarding gender. Essentialism, constructionism, and feminist psychology. *Psychology of Women Quarterly*, 17, 5-21.
- Bunge, M. (1990). What kind of discipline is psychology: Autonomous or dependent, humanistic or scientific, biological or sociological? *New Ideas in Psychology*, 8(2), 121-137.
- Christopher, J.C., & Hickenbottom, S. (2008). Positive psychology, ethnocentrism, and the disguised ideology of individualism. *Theory & Psychology*, 18(5), 563-589.
- Christopher, J.C., Richardson, F.C., & Slife, B.D. (2008). Thinking through positive psychology. *Theory & Psychology*, 18(5), 555-561.
- Fernandez-Rios, L., & Cornes, J.M. (2009). A critical review of the history and current status of positive psychology. *Annuary of Clinical and Health Psychology*, 5, 7-13.
- Furr, R.M. (2011). *Scale construction and psychometrics for social and personality psychology*. London: Sage.
- Gable, S.L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? *Review of General Psychology*, 9(2), 103-110.
- Gergen, K.J., Josselson, R., & Freeman, M. (2015). The promises of qualitative inquiry. *American Psychologist*, 70(1), 1-9.
- Giorgi, A. (2000). Psychology as a human science revisited. *Journal of Humanistic Psychology*, 40, 56-73.
- Henriques, G.R. (2003). The Tree of Knowledge System and the theoretical unification of psychology. *Review of General Psychology*, 7, 150-182.
- Henriques, G.R. (2004). Psychology defined. *Journal of Clinical Psychology*, 60, 1207-1221.
- Henriques, G.R. (2008). The problem of psychology and the integration of human knowledge. Contrasting Wilson's consilience with the Tree of Knowledge System. *Theory & Psychology*, 18(6), 731-755.
- Hogan, D.M. (2005). Researching 'the child' in developmental psychology. Dalam S. Green & D. Hogan (Eds.), *Researching children's experience. Approaches and methods* (h. 22-41). London: Sage.

- Hook, D. (2005). A critical psychology of the postcolonial. *Theory & Psychology, 15*(4), 475-503.
- Jogalekar, A. (2013, Agustus 13). Is psychology a “real” science? Does it really matter? *Los Angeles Times*.
- Jung, H.Y. (2002). Edward O. Wilson’s theory of consilience: A hermeneutical critique. *International Journal of Public Administration, 25*(9 & 10), 1171-1197.
- Koch, S. (1981). The nature and limits of psychological knowledge. Lessons of a century qua “science”. *American Psychologist, 36*, 257-269.
- Kuhn, T.S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: The Chicago University Press.
- Linley, P.A., Joseph, S., Harrington, S., & Wood, A.M. (2006). Positive psychology: Past, present, and (possible) future. *The Journal of Positive Psychology, 1*(1), 3-16.
- Miller, A. (2008). A critique of positive psychology, or “the science of happiness”. *Journal of Philosophy of Education, 42*(3-4), 591-608.
- Montero, M. (2007). The political psychology of liberation: From politics to ethics and back. *Political Psychology, 28*(5), 517-533.
- Parker, I. (2005). *Qualitative psychology. Introducing radical research*. New York: Open University Press.
- Parker, I. (2007a). *Revolution in psychology. Alienation to emancipation*. London: Pluto.
- Parker, I. (2007b). Critical psychology: What it is and what it is not. *Social and Personality Psychology Compass, 1*(1), 1-15.
- Parker, I. (2012). Postcolonial psychology. *Postcolonial Studies, 15*(4), 499-505.
- Parker, I. (2015). *Psychology after psychoanalysis. Psychological studies and beyond*. London: Routledge.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Prentice, D.A., & Miller, D.T. (2007). Psychological essentialism of human categories. *Psychological Science, 16*(4), 202-206.
- Riz, M.R. (2015). Behaviourisms. Radical behaviourism and critical inquiry. Dalam Ian Parker (Ed.), *Handbook of critical psychology* (h. 33-42). London: Routledge.
- Rorty, R. (1998). Against unity. *Wilson Quarterly, 22*, 28-38.

- Saukko, P. (2003). *Doing research in cultural studies. An introduction to classical and new methodological approaches*. London: Sage.
- Slife, B.D. (2005). Testing the limits of Henriques' proposal: Wittgensteinian lessons and hermeneutic dialogue. *Journal of Clinical Psychology, 61*(1), 107-120.
- Slife, B.D., & Richardson, F.C. (2008). Problematic ontological underpinning of positive psychology. *Theory & Psychology, 18*(5), 699-723.
- Stangor, C. (2011). *Introduction to psychology*. MIT OpenCourseWare. Diunduh dari <http://ocw.mit.edu>
- Teo, T. (2005). *The critique of psychology. From Kant to postcolonial theory*. New York: Springer.
- Teo, T. (2015). Theoretical psychology. A critical-philosophical outline of core issues. Dalam Ian Parker (Ed.), *Handbook of critical psychology* (h. 117-126). London: Routledge.
- Vazques, C. (2013). Positive psychology and its enemies: A reply based on scientific evidence. *Papeles del Psicologo, 34*(2), 91-115.
- Willig, C., & Stainton-Rogers, W. (2008). *The Sage handbook of qualitative research in psychology*. Los Angeles: Sage.
- Wilson, E.O. (1998). *Consilience: The unity of knowledge*. New York: Knopf.
- Wilson, D.S. (2012). Consilience: Making contextual behavioral science part of the United Ivory Archipelago. *Journal of Contextual Behavioral Science, 1*, 39-42.

¹ Disajikan dalam Temu Ilmiah Nasional HIMPSI bertema “Menelisik perkembangan Psikologi Indonesia” tanggal 18-19 November 2016 di Yogyakarta.

² Tiga versi awal tulisan ini pernah disajikan masing-masing dalam *Sanctioning Visi dan Misi* serta Kurikulum Prodi Psikologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 27 Januari 2015, dalam Diskusi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta tanggal 16 Maret 2015, dan dipersembahkan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kampus Fakultas Psikologi UGM 2015-2045.

³ Ketua *Kompartemen 4: Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa*, PP HIMPSI; alumnus Program Sarjana Muda (B.A., 1977) dan Program Sarjana (Drs., 1980) Psikologi Fakultas Psikologi UGM, serta Program Doktor (Ph.D., 1992) Department of Psychology, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines Diliman; guru besar psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma.

